

Kajian Tematis

**Menuju Pembangunan Damai:
Membangun Kohesi Sosial dan
Rekonsiliasi
Sulawesi Tengah dan Maluku Utara**

Juli 2004

Laporan ini didasarkan pada kajian independen oleh Konrad Huber, Dr. Christian Tindjabate and Darwis Waru (Sulawesi Tengah) dan Rob Watson, Arifah Rahmawati, Yuliati Umrah, Rasdiana Amaya dan Farida Indriani (Maluku Utara) dan tidak mencerminkan pandangan UNDP atau BAPPENAS.

Kata Pengantar

Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan (*Crisis Prevention and Recovery Unit/CPRU*) yang bernaung di bawah United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia telah aktif di Maluku Utara dan Maluku selama tiga tahun terakhir ini. Kegiatan utama meliputi prakarsa-prakarsa pemulihan multisektoral untuk melengkapi upaya Pemerintah Republik Indonesia, melakukan pemulihan pasca-konflik, pembangunan perdamaian jangka panjang, dan pembangunan yang berkelanjutan. UNDP juga sedang mengembangkan program tiga tahun di Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk mendukung proses perdamaian, melakukan tindakan jangka pendek bagi kelompok masyarakat yang rentan, dan merancang program untuk masa depan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat madani. Di ketiga provinsi tersebut UNDP bekerjasama dengan berbagai mitra seperti: pemerintah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten, organisasi-organisasi PBB lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, dan organisasi-organisasi masyarakat madani.

Pada tahun 2004, CPRU bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai suatu proses perencanaan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang utama bagi pencegahan krisis dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah yang bergejolak di Indonesia. Dari proses tersebut telah diperoleh prioritas-prioritas fase program selanjutnya, khususnya di tingkat propinsi, serta revisi strategi dan prioritas Program Pencegahan Krisis dan Pemulihan secara umum. Hasil analisa menunjukkan perlu adanya penekanan bagi tiga provinsi, yaitu – Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Tengah – tempat CPRU/UNDP telah mendukung berbagai program sejak tahun 2001. Analisis di tiap-tiap propinsi memiliki tiga komponen, yaitu (i) lokakarya multi-pemangku kepentingan (*multistakeholder*) tingkat propinsi, (ii) penelitian yang mencakup tinjauan pustaka, survei persepsi lokal serta studi kasus, dan (iii) kajian tematis atas aspek-aspek utama pencegahan krisis dan pembangunan perdamaian yang telah diidentifikasi. Kajian-kajian tingkat propinsi yang diamanatkan oleh UNDP mencakup isu-isu tematis tentang; (a) pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam, (b) tata pemerintahan daerah yang demokratis, (c) media massa dan informasi, (d) kohesi sosial dan pemuda, serta (e) perempuan dan *gender*. Kesimpulan utama kajian-kajian tersebut dirangkum dalam makalah sintesis, dan bersama dengan semua laporan tematis lainnya dapat dilihat di website UNDP Indonesia www.undp.or.id.

Kajian tematis berikut membahas isu kohesi sosial, konflik, dan pembangunan perdamaian di daerah Poso Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Sebagian besar bahan diambil dari tiga kajian dan laporan yang diselesaikan di bulan Juli 2004. Laporan-laporan tersebut adalah Kohesi Sosial dan Rekonsiliasi di Sulawesi Tengah oleh Konrad Huber, Dr. Christian Tindjabate dan Darwis Waru; Kohesi Sosial dan Rekonsiliasi di Maluku Utara oleh Rob Watson, Arifah Rahmawati, Rasdiana Amaya dan Farida Indriani; dan Pemuda di Maluku Utara Pascakonflik oleh Yuliati Umrah. Para penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu pelaksanaan kajian ini dan memberikan waktu untuk berbicara dengan tim pengkaji di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

UNDP mengucapkan terima kasih kepada Bappenas dan *peer reviewer* lainnya. Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dana dari Department for International Development Inggris dan UNDP.

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN.....	6
1.1 Definisi.....	6
1.2 Tujuan dan Pendekatan.....	7
2. KONTEKS SOSIAL DAN KONFLIK DI MALUKU UTARA DAN SULAWESI TENGAH.....	10
2.1 Maluku Utara.....	10
2.2 Sulawesi Tengah (Poso).....	12
3. KOHESI SOSIAL DI MALUKU UTARA DAN SULAWESI TENGAH.....	16
3.1 Kohesi Sosial dan Segregasi di Maluku Utara.....	16
3.2 Kohesi Sosial dan Segregasi di Sulawesi Tengah.....	21
4. MEMBANGUN PERDAMAIAN DAN MEMPERKUAT KOHESI SOSIAL.....	27
4.1 Pasar dan Hubungan Sosial.....	27
4.2 Kegiatan Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian.....	27
4.3 Sekolah dan Perguruan Tinggi.....	28
4.4 Organisasi Pemuda dan Perempuan.....	28
4.5 Kerjasama Berbasis Rumah Tangga dan Masyarakat.....	30
4.6 Kelompok Pekerja atau Organisasi Profesi.....	31
4.7 Tokoh Masyarakat, Tradisi dan Kerjasama Antar umat Beragama.....	31
4.8 Forum Rekonsiliasi Lokal.....	32
4.9 Struktur dan Proses Pemerintahan.....	33
4.10 Struktur, Isu, dan Dinamika yang memecah-belah Masyarakat.....	34
5. KESIMPULAN DAN SARAN – KERANGKA KERJA UNTUK DUKUNGAN.....	36
5.1 Tanggapan Pascakonflik untuk memperkuat Kohesi Sosial.....	36
5.2 Rekomendasi Kerangka Kerja untuk Tindakan Terencana.....	37
5.3 Bidang-bidang Interaksi dan Sinergi dengan Upaya Lain.....	42
5.4 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi.....	42
5.5 Ringkasan.....	43

Ringkasan Eksekutif

Konflik di Maluku Utara dan Poso telah mengakibatkan perpecahan masyarakat berdasar perbedaan identitas agama. Akibat dari kekerasan komunal dan rasa tidak aman yang ada, komunitas-komunitas dalam masyarakat menjadi terpisah secara fisik, masing-masing menggunakan jasa layanan public yang terpisah, termasuk pasar dan jasa transportasi. Tambahan lagi, perpecahan tidak hanya terjadi antara umat Kristiani dan Muslim, tetapi juga berdasarkan identitas suku, khususnya di Maluku Utara. Kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah juga tidak lagi percaya pada para elit lokal dan pimpinan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak mempedulikan kebutuhan masyarakat dan tidak bersedia melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan beserta para pemimpinnya dalam proses penyelesaian masalah, pencapaian keamanan, dan pembangunan di tingkat lokal.

Empat tahun sejak pecahnya konflik, telah terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Masyarakat telah mulai membaaur dan memperlihatkan tanda-tanda perbaikan sosial dan ekonomi, disamping perbaikan hubungan masyarakat. Pemekaran wilayah di kedua wilayah propinsi membawa tantangan khusus dan sangat penting baik bagi pemerintah maupun masyarakat madani. Perlu adanya tanggapan yang efektif terhadap tantangan (dan kesempatan) yang muncul, tidak hanya dalam menghadapi pemerintahan yang baru, tetapi juga dalam tugas pembangunan bersama pascakonflik dan pembangunan perdamaian. Meskipun banyak pengungsi telah kembali, masih tersisa kecurigaan dan ketegangan yang harus ditanggulangi demi menjaga perdamaian. Penting bagi pengungsi (minoritas) yang telah kembali untuk merasa aman serta memperoleh fasilitas dan kesempatan yang sama di wilayah kabupaten-kabupaten baru dimana mereka berpindah, sebagaimana layaknya penduduk mayoritas, serta turut merasa sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas di wilayah-wilayah baru tersebut. Memperkuat kohesi sosial dan menjalin hubungan di dalam komunitas masyarakat tetap menjadi satu hal yang perlu ditindaklanjuti di wilayah Maluku Utara dan Poso. Untungnya, banyak bermunculan serangkaian institusi dan inisiatif lokal, terutama dari masyarakat madani dan komunitas itu sendiri, yang menjurus kepada perbaikan dan semakin memperkuat hubungan dan kohesi sosial di seluruh wilayah Maluku Utara dan Poso.

Akan tetapi untuk alasan yang berbeda, pihak-pihak luar seharusnya tidak terburu-buru memberikan dukungan dalam proses tersebut. Akan lebih baik jika pihak luar memainkan peran terbatas dan melakukan pendampingan pada pemerintah daerah dan pelaku organisasi kemasyarakatan yang ada. Daerah-daerah sedang mengalami proses 'organik' dalam hal pembauran kembali secara demografis, pengembangan 'kisah' mengenai sebab dan akibat kekerasan yang baru terjadi, dan sedang memikirkan (ulang) landasan untuk kembali hidup bersama. Sedangkan kemungkinan pihak luar untuk lebih membantu proses ini tidak terlalu nyata. Meskipun pihak-pihak luar dapat memberikan bantuan terbatas pada beberapa kelompok rekonsiliasi dan forum yang aktif, ada bahaya munculnya dampak negatif dan tidak diinginkan, contohnya dengan 'meminggirkan' usaha-usaha rekonsiliasi murni dengan adanya kemungkinan pemberian dana khusus bagi kegiatan tersebut. Tambahan lagi, distribusi bantuan itu sendiri seringkali menimbulkan ketegangan sosial di beberapa bidang. Selain itu, tampaknya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 'masalah' kekerasan dengan 'solusi' mendorong rekonsiliasi. Penyebab dan pendorong konflik, baik di Maluku Utara dan Poso, belum dapat ditangani dan tidak bersifat statis selama lima tahun terakhir. Rendahnya kohesi sosial di tingkat komunitas hanyalah salah satu faktor pendorong yang dapat dikatakan relatif kecil pengaruhnya terhadap tindak kekerasan komunal.

Jika pihak-pihak luar ingin mendukung kohesi sosial dan rekonsiliasi, mereka harus melakukannya melalui program yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui cara yang juga dapat menyatukan elemen-elemen kunci pada kelompok-kelompok suku dan agama, sehingga memperkuat hubungan di antara mereka. Proses pembuatan program harus menekankan analisis, perencanaan, dan tindakan lokal yang berdampak pada perbaikan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Sebagai contoh, untuk mengatasi persoalan pemuda pengangguran dapat dilakukan program pelatihan kerja kelompok dimana kelompok terdiri dari campuran agama, suku, dan jenis kelamin melalui Balai Latihan Kerja di lokasi-lokasi strategis. Inisiatif seperti ini harus didasarkan pada analisis yang kuat akan kebutuhan pasar tenaga kerja, bantuan bertahap untuk unit usaha kecil yang terkait dengan

latihan kerja, dan proses perencanaan yang cepat tetapi menyeluruh, yang mencakup calon penerima bantuan dan rekanan proyek tersebut. Desain dan manajemen proyeknya harus benar-benar menyeluruh dan bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar kelompok elit lokal, seperti pejabat pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu, alternatif lain yang mungkin dilakukan adalah bantuan yang terfokus dan terbatas untuk upaya-upaya rekonsiliasi di tingkat masyarakat, yang didasarkan pada analisa lebih mendalam terhadap kebutuhan dan kemampuan daerah tersebut. Untuk proyek rendah biaya dan sangat terfokus, bantuan dapat diberikan untuk mendanai pelatihan kepemimpinan masyarakat, sponsor untuk kegiatan perencanaan partisipatif, dan/atau menghapus atau menanggulangi hambatan-hambatan materi tertentu yang ditemukan selama proses ini. Dampak dari upaya-upaya rekonsiliasi tersebut terhadap konflik dan kekerasan yang mengikutinya kemungkinan sangat tidak terasa. Sebagai catatan akhir, bantuan melalui penggunaan media, baik siaran radio maupun publikasi dan video ‘terbatas’, dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk memancing interaksi dan diskusi antara komunitas-komunitas yang terimbas konflik, mengenai kebutuhan dan aspirasi mereka bisa jadi berguna dan ekonomis. Harus ditekankan bahwa perencanaan program melalui media bukanlah pengganti dalam memenuhi kebutuhan konkrit masyarakat, tetapi lebih kepada sebuah cara untuk mendukung dan melipatgandakan dampak keberhasilan suatu program ke bidang-bidang lain.

1. Pendahuluan

Konflik dan kekerasan memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, memperdalam jurang pemisah sosial dan seringkali mengakibatkan pemisahan masyarakat secara fisik. Bantuan untuk membangun perdamaian pada masyarakat pascakonflik yang sudah terpecah-belah tidak hanya membutuhkan pemahaman akan penyebab konflik itu sendiri, tetapi juga pengetahuan mengenai apa yang dapat menyatukan manusia dan masyarakat. Singkatnya, pihak-pihak yang bertujuan mendukung perdamaian harus mempelajari apa yang bisa membangun kohesi sosial dalam sebuah masyarakat yang sudah terpecah. Kajian ini membahas masalah kohesi sosial di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, dua provinsi di bagian timur Indonesia yang sedang mengalami proses pemulihan dari konflik dan kekerasan social. Kajian dilakukan dalam rangka merumuskan strategi untuk masa depan demi mendukung perdamaian dan pembangunan di kedua provinsi tersebut.

Laporan ini menjabarkan temuan dan rekomendasi dari dua kajian yang membahas kohesi sosial di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, dan satu kajian lain yang menyoroti pemuda, kohesi sosial, dan pembangunan perdamaian di Maluku Utara.¹ Laporan ini menyajikan saran untuk memperkuat dan membangun kembali kohesi sosial di provinsi tersebut melalui proyek-proyek yang mungkin diterapkan dan ide-ide lintas isu mengenai kohesi social, mencakup di dalamnya isu-isu tematis lain, seperti pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan ketenagakerjaan.

1.1 Definisi

Kohesi sosial terkadang didefinisikan sebagai perekat yang menyatukan masyarakat, membangun keselarasan dan semangat kemasyarakatan, serta komitmen untuk mencapai

tujuan-tujuan bersama.² Diasumsikan bahwa kohesi sosial merupakan syarat dasar bagi sebuah masyarakat.³ Di sisi lain, konflik merupakan sebuah proses dinamis dan saling mempengaruhi antara isu-isu yang bertentangan (situasi konflik yang mendasar), sikap negatif (persepsi pihak-pihak yang bertentangan terhadap pihak lain dan pihaknya sendiri), serta perilaku pemaksaan dan kekerasan (tindakan antara pihak-pihak yang bertentangan).⁴

Tidak ada definisi kohesi sosial yang disepakati secara universal. Kebijakan, penelitian, analisis, dan kajian biasanya menggunakan definisi mereka masing-masing. Sebagai contoh, Dewan Eropa mendefinisikan kohesi sosial sebagai “kemampuan suatu masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggotanya, menekan perbedaan dan menghindari polarisasi. Masyarakat yang kohesif merupakan komunitas yang terdiri dari individu-individu bebas yang saling mendukung, mencapai tujuan bersama secara demokratis”.⁵ Sebaliknya, Ritzen et al. (2000) lebih menekankan aspek modal sosial dari kohesi sosial, dengan mendefinisikannya sebagai “satu keadaan dimana sekelompok orang (dalam suatu wilayah geografis) menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dan menghasilkan iklim untuk perubahan”.

Lima dimensi utama dari kohesi sosial ditemukan dari empat dokumen kebijakan pemerintah Perancis dan Kanada, OECD, dan Kelompok Roma. Lima dimensi tersebut mencakup (i) *kebersamaan – isolasi* (nilai-nilai bersama, identitas, perasaan komitmen), (ii) *pengikutsertaan – pengesampingan* (kesempatan yang setara untuk memperoleh akses), (iii) *partisipasi – ketidakterlibatan* (dalam hal kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya), (iv) *penerimaan – penolakan* (menghargai dan mentoleransi perbedaan dalam masyarakat majemuk) dan (v) *legitimasi – ilegitimasi* (akan

¹ Konrad Huber, Christian Tindjabate dan Darwis Waru melakukan penelitian tentang kohesi sosial Sulawesi Tengah (15-22 Maret 2004); Arifah Rahmawati, Rob Watson, Farida Indriani, Rasdiana Amaya dan Ronald Tadubun melakukan penelitian tentang kohesi sosial di Maluku Utara (12-29 Mei 2004); Yuliati Umrah, Siti Barorah Sinay and Joan Do Anas meneliti kelompok masyarakat pemuda di Maluku Utara (15-22 Maret 2004).

² Nat J. Colletta, Teck Ghee Lim, Anita Kelles-Viitanen, *Social Cohesion and Conflict Prevention in Asia: Managing Diversity through Development*, (Washington D.C.: The World Bank) 2001, hlm. 2.

³ Sharon Siddique, “*Social Cohesion and Social Conflict in Southeast Asia*” dalam *Ibid.* hlm. 18.

⁴ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage, 1996).

⁵ *European Committee for Social Cohesion* (2004) *Revised Strategy for Social Cohesion*.

institusi-institusi yang berperan sebagai mediator dalam konflik di masyarakat majemuk).⁶ Ulasan ini mengidentifikasi dua dimensi tujuan sosial dari kohesi sosial. Yang pertama mengenai mengurangi perbedaan, ketidakadilan, dan pengesampingan sosial. Sementara yang kedua menekankan pada memperkuat hubungan, interaksi dan ikatan sosial, kurang lebih mencakup landasan konsep yang sama seperti modal sosial.⁷

Membangun kohesi sosial merupakan elemen penting dalam membangun perdamaian dan pembangunan dalam masyarakat pasca konflik, dimana usaha-usaha perdamaian dan pembangunan harus dapat mempengaruhi dinamika sosial sehingga membawa perubahan positif. Perubahan ini dapat berupa berkurangnya tindak kekerasan, sikap yang lebih positif dari individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat, dan tindakan-tindakan yang diharapkan mengubah persoalan-persoalan yang dianggap sebagai inti konflik. Penekanan pada pembangunan kohesi sosial dapat membantu mengembangkan kepercayaan, asosiasi antar kelompok, dan jaringan komunikasi antara kelompok-kelompok yang terpisah akibat konflik. Hasil dari pembangunan kohesi sosial di bidang-bidang, seperti menjembatani kerjasama, rasa saling memahami, dan penciptaan kepentingan bersama, dapat menjadi dasar untuk mekanisme pencegahan konflik, pemulihan, dan mempertahankan perdamaian yang berkelanjutan.

Secara khusus, pemuda dan remaja dapat disebut sebagai kelompok yang cukup penting jika dikaitkan dengan kohesi sosial, konflik, dan perdamaian.⁸ Pada situasi konflik bersenjata,

pemuda merupakan kelompok terdepan karena kerentanan mereka. “*Mungkin yang paling penting, adalah bahwa remaja sedang berada pada tahap perkembangan dimana untuk pertama kalinya, mereka sedang secara aktif mencari cara untuk memberi arti pada hidup mereka. Kegagalan untuk menyediakan tujuan hidup yang positif dan produktif bagi remaja selama terjadinya konflik bersenjata mengakibatkan mereka mudah putus asa dan rentan terhadap orang-orang yang ingin memanipulasi mereka – dengan menarik mereka ke dalam konflik maupun memanfaatkan dan mencelakakan mereka dengan cara lain.*”⁹ Pemuda dan remaja membutuhkan perlakuan khusus di dalam diskusi mengenai kohesi sosial, konflik, dan perdamaian.

1.2 Tujuan dan Pendekatan

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk lebih memahami dinamika masyarakat dalam memperkuat atau mengancam kohesi sosial serta harapan akan perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah Maluku Utara dan Poso. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang ada untuk mendukung dinamika “pendukung perdamaian”, terlebih yang selama ini luput dari perhatian pihak-pihak luar. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi pola dan sifat terkini dari perpecahan dan kohesi sosial, dan menganalisa hubungan antara hal-hal tersebut dengan dinamika konflik dan perdamaian di masing-masing provinsi.
- Memetakan institusi-institusi, persoalan-persoalan, jaringan, dan individu-individu utama yang berperan dalam kohesi sosial dan rekonsiliasi, dengan perhatian khusus pada perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat.
- Mengidentifikasi pendekatan-pendekatan dan mitra-mitra yang berpotensi untuk memperkuat kohesi sosial termasuk peningkatan kapasitasnya.
- Memberikan rekomendasi dan pilihan (fokus, prioritas, titik masuk, strategi, kegiatan, dan mitra potensial) untuk program yang bertujuan memperkuat ikatan di dalam

remaja (12-19) dan dewasa muda (20-24), karena permasalahan sosiologis, psikologis, dan kesehatan yang mereka hadapi berbeda-beda. www.un.org/youth.

⁹ The Women’s Commission (2000) ‘*Untapped Potential – Adolescents Affected by Armed Conflict*’.

⁶ Berger-Schmitt (2000) *Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement. EuReporting Working Paper No 14.*

⁷ Ibid; lihat juga Ritzen et al. dalam “*Good*” *Politicians and “Bad” Policies: Social Cohesion, Institutions and Growth. World Bank.* Jo Ritzen, William Easterly, dan Michael Woolcock (September 2000) *Policy Research Working Paper 2448.*

⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pemuda sebagai orang yang berumur antara 15 sampai 24 tahun, sebuah kelompok umur yang mencakup tahun-tahun penting transisi dari masa remaja kepada kedewasaan. Dewan PBB mendefinisikan ‘pemuda’, sebagai mereka yang termasuk pada cakupan umur antara 15 sampai 24 tahun. Akan tetapi, definisi operasional dan nuansa istilah ‘pemuda’ seringkali berbeda antarnegara, tergantung pada faktor-faktor sosial budaya, institusi, ekonomi, dan politik. Di dalam kategori “pemuda”, penting untuk membedakan

komunitas dan antar komunitas atau antar kelompok, serta mekanisme yang tidak formal dalam menyelesaikan pertentangan, membangun kepercayaan, dan dengan demikian meningkatkan daya tahan komunitas terhadap konflik kekerasan di provinsi-provinsi tersebut.

Tim pengkaji mendefinisikan kohesi sosial sebagai sesuatu yang berhubungan dengan *kepercayaan* dan *asosiasi* antar kelompok yang terpecah dan di dalam kelompok itu sendiri. Kejujuran dan keadilan dilihat sebagai aspek utama dari kepercayaan. Warga desa, Kepala Desa, Bupati, serta para staf LSM diwawancarai mengenai persepsi mereka atas sejumlah pelaku yang berpengaruh dalam konflik dan kohesi sosial. Asosiasi dalam dan antar desa juga telah diamati, contohnya keberadaan ikatan primordial (suku, agama, keluarga), kelompok-kelompok yang dibentuk (organisasi formal dan non-formal, usaha-usaha rekonsiliasi), dan kewarganegaraan (ikatan warga kampung, dan lain-lain).

Maluku Utara

Dalam menetapkan wilayah-wilayah untuk penelitian ini, tim pengkaji menerima masukan dari Kelompok Kerja Analisis Perdamaian dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara. Secara khusus, kelompok kerja ini mengangkat persoalan kecemburuan sosial yang disebabkan oleh pola intervensi yang berlaku di provinsi tersebut, yang terkonsentrasi di Halmahera Utara, yang mayoritas penduduknya merupakan umat Kristiani. Kelompok Kerja khawatir bahwa hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan semakin memperburuk ketegangan di provinsi tersebut. Diusulkan sebaiknya kajian juga mencakup wilayah selatan provinsi ini, khususnya Halmahera Selatan, sehingga bisa menyediakan informasi baru dan gambaran yang lebih seimbang mengenai kebutuhan pembangunan pasca-konflik di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tim pengkaji memilih daerah-daerah kajian dengan pertimbangannya sebagai berikut:

- Kabupaten Ternate merupakan ibukota provinsi Maluku Utara dan merupakan pusat konflik di wilayah provinsi ini. Ternate merupakan salah satu tempat dimana mobilisasi massa, baik dari segi suku maupun agama, terpusat selama konflik di tahun 1999-2001. Kecamatan-kecamatan yang dikunjungi pada kajian ini adalah Ternate Selatan dan Ternate Utara.

- Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu wilayah utama tempat bermulanya konflik di Kecamatan Kao dan Malifut pada bulan Agustus 1999, di mana konflik terjadi antara kelompok suku Kao dan Makian. Menjelang akhir tahun tersebut, konflik merebak ke Kecamatan Tobelo dan Galela, dan telah berubah menjadi konflik agama. Konflik awal di kabupaten ini turut menyebabkan konflik di Ternate, yang kemudian memberikan pengaruh lebih luas ke wilayah lain di Maluku Utara termasuk Tobelo dan Galela. Kota Tobelo, Kecamatan Galela, Kao, dan Malifut dipilih untuk kajian ini.

- Kabupaten Halmahera Barat juga mengalami beragam intervensi pemulihan dan rekonsiliasi pasca-konflik yang menargetkan pemuda di tiga kecamatan utama: Jailolo, Sahu dan Ibu. Konflik kekerasan yang signifikan terjadi di kabupaten ini tetapi tidak mencapai tingkat yang sama seperti yang terjadi di Halmahera Barat dan Ternate. Yang menarik dari Halmahera Barat adalah bagaimana usaha-usaha rekonsiliasi dicetuskan oleh masyarakat akar rumput untuk membantu proses pemulangan pengungsi. Pengungsi asal Sahu merupakan kelompok pertama yang kembali ke desa asal secara independen. Kecamatan Jailolo dan Sahu dikunjungi selama pengkajian ini.

- Kabupaten Halmahera Utara hanya mengalami sedikit konflik kekerasan, meskipun sejumlah besar pengungsi berasal dari kabupaten ini, khususnya Pulau Bacan. Informasi mengenai kelompok masyarakat pemuda di Halmahera Utara sangat terbatas selama periode konflik hingga pasca konflik, mungkin karena wilayah ini terisolasi dan hanya menderita sedikit akibat konflik dibandingkan daerah lainnya. Kecamatan yang dikunjungi adalah Bacan Tengah dan Bacan Timur.

- Kabupaten Halmahera Timur termasuk kabupaten yang tidak mengalami konflik kekerasan. Dalam hal ini analisa didasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dari Kecamatan Maba Selatan.

Tim pengkaji mengunjungi tiga desa di setiap kecamatan. Desa-desa tersebut terpilih berdasarkan komposisi agama: Islam, Kristiani, dan campuran. Tim ini menemukan hanya sedikit desa yang agama penduduknya campur di Kota Ternate, Galela, Sahu, dan Jailolo. Di setiap desa, tim pengkaji melakukan wawancara perorangan dan kelompok terhadap kaum muda, para tokoh

masyarakat (termasuk perempuan) dan agama, serta ketika memungkinkan, tim berkunjung menemui Kepala Desa, Camat, dan Bupati.

Sesi pemuda pada kajian di Maluku Utara mengumpulkan informasi melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (DKT), dan lokakarya.¹⁰ DKT membahas (i) latar belakang konflik di Maluku, (ii) peran kaum muda selama periode konflik dan pasca konflik, termasuk pembangunan perdamaian, dan (iii) harapan mereka untuk masa datang. Setelah serangkaian diskusi kelompok terfokus dijalankan, hasilnya dibahas dalam lokakarya kecil dengan jumlah peserta terbatas guna mendapatkan tanggapan. Proses partisipatif ini bertujuan untuk memberdayakan peserta dalam hal memberikan kesempatan untuk perenungan dan pembelajaran, terutama mengenai keterlibatan mereka dalam berbagai proses.

Sulawesi Tengah

Dalam konsultasi dengan pemangku-pemangku kepentingan setempat, tim lapangan memilih enam lokasi untuk penelitian mendalam mengenai dinamika tingkat masyarakat dan dampaknya terhadap perdamaian dan konflik. Enam lokasi tersebut adalah:

- Tambarana-Trans (Poso Pesisir, Kabupaten Poso) adalah desa yang tidak mengalami kekerasan skala besar, meskipun letaknya berdekatan dengan wilayah konflik dan penduduknya terdiri dari beragam suku dan agama.

- Saatu (Poso Pesisir, Kabupaten Poso), mengalami kerusakan di tahun 2000-2002, serangan terbaru pada bulan Oktober 2003, dan kepulangan pengungsi baik dari kelompok Muslim maupun Kristiani.

- Matako (Tojo Barat, Kabupaten Tojo-Una Una) penduduknya terpaksa mengungsi karena adanya kerusakan di dekatnya, dan dalam skala kecil juga terjadi pada tahun 2000-2002. Sebagian besar pengungsi, baik Muslim maupun Kristiani saat ini telah kembali.

- Tentena (Pamona Utara, Kabupaten Poso), tidak secara langsung mengalami kerusakan skala besar, tetapi merupakan daerah tujuan pengungsian utama bagi 10.000

pengungsi Kristiani asal Kecamatan Poso Pesisir, Lage dan Tojo.

- Pendolo (Pamona Selatan, Kabupaten Poso) mengalami kerusakan skala kecil, sebagian besar merupakan tindak kekerasan yang tidak fatal.

- Beteleme (Lembo, Kabupaten Morowali), meski terdiri dari campuran suku dan agama, desa ini tidak mengalami kerusakan sampai bulan Oktober 2003.

Di setiap lokasi-lokasi tersebut (serta lokasi-lokasi terkait di sekitarnya yang dianggap relevan), tim pengkaji mewawancarai sejumlah penduduk lokal dari beragam kalangan, termasuk para pejabat pemerintah, tokoh agama, guru, pedagang, kaum muda, dan pengungsi. Wawancara – baik perorangan maupun berkelompok, dilakukan tanpa struktur formal yang kaku tetapi tetap ditujukan untuk mengidentifikasi dinamika di tingkat komunitas yang terkait dengan tindak kekerasan komunal dan/atau kohesi sosial dan rekonsiliasi. Upaya khusus dilakukan untuk memahami peran dan kebutuhan kaum muda. Sebagai tambahan, tim mewawancarai sejumlah tokoh yang lebih terkemuka dan memainkan peran yang lebih luas, baik secara formal maupun non-formal dalam hubungan antar kelompok dan rekonsiliasi di tingkat kabupaten.

¹⁰ Diskusi kelompok terarah merupakan sebuah proses pengumpulan informasi mengenai sikap dan pendapat berdasarkan keikutsertaan penuh oleh mereka yang dipengaruhi oleh masalah-masalah dan persoalan-persoalan khusus.

2. Konteks Sosial dan Konflik di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah

Kohesi sosial di Maluku Utara dan Poso berkembang dalam konteks sosial khusus yang dibedakan oleh latar belakang sejarah, keragaman sosial, dan pengalaman kerusuhan serta konflik sosial yang terjadi di masing-masing wilayah belum lama ini. Sifat konflik, intensitas, dan luasnya tindak kekerasan serta serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi akan sangat mempengaruhi hubungan antara kohesi sosial, konflik, dan perdamaian. Bagian ini secara singkat akan menggambarkan keadaan sosial serta demografi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, dan mengaitkannya dengan pengalaman konflik serta upaya-upaya untuk memfasilitasi rekonsiliasi.

2.1 Maluku Utara

Keragaman Sosial dan Populasi

Penduduk Maluku Utara yang berjumlah 700,000 jiwa terdiri dari lebih dari seratus kelompok suku. Beberapa kelompok suku utama yang jumlah anggotanya diketahui mencakup Sula (9,5%), Makian (9,1%), dan Galela (7,9%). Akan tetapi lebih dari setengah jumlah populasi diklasifikasikan sebagai kelompok suku 'lain-lain' dalam data resmi.¹¹

Masyarakat di Halmahera telah sering mengalami proses pemukiman ulang demi pembangunan; dengan penambahan beberapa desa baru yang terbentuk dalam waktu seratus tahun terakhir. Migrasi lokal, khususnya oleh orang-orang Makian, Bacan, Tidore, dan Sanana telah membuat masyarakat di wilayah ini menjadi semakin beragam.

Banyak penduduk yang juga bermigrasi dari luar Maluku Utara demi mencari kesempatan baru. Program transmigrasi telah mendatangkan komunitas Bugis, Jawa, Sunda (Jawa Barat), Gorontalo, Buton, dan Minang. Migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa dan Sunda biasanya didukung dan disponsori oleh pemerintah, sehingga mereka cenderung hidup di desa-desa tertentu di daerah pedesaan. Sementara pendatang dari Bugis, Gorontalo dan Minang sebagian besar merupakan pedagang yang menetap, terutama di kota. Orang-orang dari Buton umumnya merupakan petani yang

cenderung menetap di wilayah pedesaan di pulau Obi and Bacan. Pada tahun 1990, tertarik oleh peluang ekonomi, para pendatang dari Ambon, Manado dan Sangir mulai menetap di Maluku Utara, sebagian besar di bagian selatan Ternate. Kelompok yang berasal dari Ambon terdiri dari umat Kristiani dan Muslim, sedangkan yang dari Manado dan Sangir sebagian besar merupakan umat Kristiani.

Penduduk Maluku Utara umumnya beragama Islam (85%), dan hampir semua sisanya merupakan umat Protestan. Menurut sensus tahun 2000, sebagian besar umat Kristiani berada di bekas kabupaten Maluku Utara, khususnya di daerah sekitar Tobelo dan Kao. Budaya Maluku Utara mencerminkan campuran tradisi lokal dan pengaruh empat Kesultanan Islam yang ada di provinsi itu, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Sebagian besar masyarakat di bagian utara Halmahera, termasuk yang Kristen, mengakui posisi Sultan Ternate, dan bahwa hak guna lahan yang ada pada mereka berasal dari Sultan, yang dikelola oleh tokoh lokal atau *sangaji*. Sebelum konflik, identitas suku sangat kuat, dan dalam banyak hal, lebih kuat dari pada identitas agama, sehingga ada beberapa keluarga yang beranggotakan pemeluk Islam maupun Kristen.

Dinamika Konflik di Maluku Utara

Hanya dalam beberapa bulan, konflik komunal di Maluku Utara menyebar dengan sangat cepat dari satu desa ke desa lainnya, meskipun dinamika yang mendasarinya berbeda antar wilayah dan bahkan terkadang antar desa. Dinamika konflik bergeser dengan sangat cepat dari ketegangan antar suku mengenai sengketa tanah menjadi konflik antar agama untuk menarik lebih banyak dukungan. Terlepas dari pandangan umum atas konflik yang terjadi, di tingkat elit masyarakat juga terjadi konflik perebutan kekuasaan politik.

Perkembangan konflik di Maluku Utara dan persoalan-persoalan yang mendasarinya dapat dibagi menjadi tiga tahap berikut:

- Agustus 1999 – Konflik pembagian tanah dan pemekaran kecamatan baru Malifut di Kao. Konflik dan kerusuhan di Maluku Utara dimulai di bulan Agustus 1999 sebagai akibat dari ketegangan antarsuku, sengketa

¹¹ Populasi Maluku Utara, Sensus tahun 2000, Badan Pusat Statistik (BPS).

lahan, serta pemekaran wilayah tanpa konsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Satu kecamatan baru, yaitu Malifut, ditujukan untuk menyediakan wilayah kecamatan khusus bagi orang-orang Makian dalam wilayah tradisional Kao, yang terusir dari rumah mereka lebih dari 25 tahun yang lalu oleh karena ancaman meletusnya gunung berapi di Pulau Makian. Dalam hal ini, penduduk lokal Kao merasa bahwa orang-orang Makian menerima perlakuan khusus, dan lima desa yang secara tradisional berada di bawah otoritas adat Kao dimasukkan ke dalam kecamatan Malifut baru. Orang-orang Kao juga mencurigai adanya agenda 'Islamisasi' karena orang-orang Makian beragama Islam sedangkan sebagian besar orang-orang Kao beragama Kristen. Orang-orang Kao juga berkeberatan dengan pemberian nama Malifut bagi kecamatan baru tersebut dan merasa bahwa budaya dan adat istiadat mereka tidak dihargai.

Kehadiran tambang emas baru yang dikelola pihak dari Australia juga menyebabkan kebencian lebih lanjut karena kabarnya orang-orang Makian lebih banyak memperoleh kesempatan kerja dibandingkan penduduk lokal Kao, Modole, dan Jailolo. Pada bulan Agustus 1999, sebuah perkelahian terjadi di kalangan pemuda yang menyebabkan tewasnya seorang remaja Makian. Kaum muda Makian dan Kao kemudian berperang melampaui batas desa, khususnya dengan sasaran orang-orang Makian berikut rumah-rumahnya. Konflik Kao/Malifut bukan merupakan konflik antaragama karena sasaran utamanya adalah orang dan rumah Makian, tidak ada mesjid yang rusak, dan baik kalangan Muslim maupun Kristen ikut serta menyerang orang-orang Makian di Malifut. Kekerasan kembali merebak pada bulan Oktober 1999 yang menyebabkan mayoritas orang-orang Makian terpaksa mengungsi ke Ternate.

• Awal November 1999 – Kekuatan 'Kuning' dan 'Putih' di Ternate dan Tidore berperang untuk memperoleh supremasi politik di tingkat provinsi. Dengan ribuan orang mengungsi dari Kao/Malifut ke Ternate di bulan Oktober 1999, konflik ini menyebar ke wilayah-wilayah lain dan berkembang menjadi konflik antaragama. Dengan latar belakang konflik yang terjadi di Ambon dan Kao/Malifut, serangan terjadi di Tidore dan

Ternate.¹² Di Ternate, pihak militer dan 'kekuatan kuning' yang setia kepada Sultan Ternate melindungi umat Kristiani, yang menjurus kepada pecahnya konflik antara kekuatan muslim 'putih' dan 'kuning'. 'Kekuatan putih' terdiri dari kelompok suku Tidore, Makian, dan para imigran dari Gorontalo di Sulawesi Utara. Sedangkan 'kekuatan kuning' mencakup pendukung Sultan Ternate dan umat Kristiani dari Halmahera. Setelah Sultan Ternate menyerah, garis pertempuran ditarik antara umat Kristiani dan Muslim. Pecahnya kekerasan di satu wilayah secara langsung berpengaruh pada konflik di wilayah-wilayah lain, khususnya melalui pengerahan pasukan perang dan pengungsian kelompok minoritas ke daerah-daerah dimana mereka adalah mayoritas. Isu agama digunakan oleh kedua belah pihak untuk menarik dukungan, meski sebenarnya perebutan lahan, pertentangan politik, dan persoalan-persoalan lokal lain sangat mempengaruhi perpecahan masyarakat melawan satu sama lain.

• Akhir November 1999 dan setelahnya – Konflik antar agama menyebar ke seluruh Maluku Utara. Di Halmahera Barat, Tengah dan Selatan, berlangsung peperangan antardesa, pengungsi melarikan diri, dan desa-desa dibakar. Kerusuhan di wilayah Halmahera dipicu oleh isu bahwa kekuatan Jihad telah tiba di Galela dan serangan terhadap desa-desa di Tobelo akan segera terjadi. Hal ini menyebabkan penduduk kedua desa mempersiapkan diri untuk mempertahankan harta benda mereka. Kerusuhan dan pengrusakan menyebar ke desa-desa lain di Maluku Utara, termasuk Bacan, Obi, Morotai, Ibu, Sahu dan Jailolo. Di Jailolo contohnya, konflik kekerasan terjadi di tempat yang tadinya penduduk Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara harmonis. Warga di sini berbicara tentang tekanan dari 'orang-orang luar atau provokator', yang mengintimidasi mereka untuk menyerang orang-orang atau desa-desa yang berlainan agama. Ketika penduduk mempersiapkan diri untuk bertahan atau menyerang desa-desa lain, serangkaian serangan dan serangan balik terjadi. Pola peperangan seperti ini (serangan dan serangan balik) dan rasa takut terhadap orang-orang luar – tanpa menyebutkan siapa atau dari mana – diceritakan oleh warga, baik

¹² Surat ini umumnya dianggap palsu dan ditujukan untuk memicu kekerasan.

Kristen maupun Muslim, di hampir setiap wilayah Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak mengalami kerusuhan, meski banyak terdapat desa yang penduduknya terdiri dari campuran Kristiani dan Muslim.

- **Menciptakan Perdamaian:** Kerusuhan di Maluku Utara menyebabkan adanya operasi keamanan besar-besaran di tahun 2000 untuk memulihkan keadaan. Tentara memainkan peran utama khususnya melalui Satuan Tugas (Satgas) yang sebagian besar anggotanya berasal luar provinsi (khususnya Jawa). Setelah kekerasan berhasil dihentikan, Satgas menjalankan peran penting; termasuk menjembatani kesepakatan damai lokal, pembentukan kelompok-kelompok rekonsiliasi lokal, dan pemulangan pengungsi. Tentara, juga didukung oleh pihak kepolisian, khususnya dari Brigade Mobil (Brimob), melakukan tindakan keamanan, keadaan darurat, dan perbaikan pasca konflik, mampu mengakhiri kerusuhan, memenuhi kebutuhan dasar sejumlah besar pengungsi, memperbaiki sebagian infrastruktur yang rusak. Sampai tahun 2004 mereka telah memulangkan sebagian besar pengungsi ke wilayah masing-masing.

Pengungsian dan pemulangan Pengungsi

Konflik di Maluku Utara menyebabkan lebih dari 300.000 orang mengungsi, kurang lebih sepertiga dari keseluruhan jumlah penduduk provinsi ini yang berjumlah 794.000 jiwa. Proses pengungsian dan pemulangan pengungsi menjadi pengalaman dalam konflik bagi banyak penduduk dan cenderung sangat mempengaruhi sikap mereka pada masa pasca-konflik di Maluku Utara. Sebagian besar pengungsian di Maluku Utara terjadi pada kuartal akhir 1999, ketika konflik menyebar di provinsi ini. Secara umum, pengungsi merupakan penduduk minoritas di daerah tempat tinggal mereka, dimana minoritas Kristiani mengungsi dari daerah mayoritas Muslim seperti Ternate dan Bacan, sementara minoritas Muslim mengungsi dari daerah mayoritas Kristen seperti Tobelo. Pola ini terjadi berulang-ulang di daerah-daerah sepanjang Maluku Utara yang terpengaruh oleh konflik. Sampai dengan pertengahan tahun 2000 dimana terjadi perpecahan total antar komunitas berdasar agama. Umat Kristiani dari Bacan mengungsi ke Bitung, Manado, Seram, Tual, Smlaki dan

Sorong, sedangkan imigran Muslim kembali ke Jawa, Buton dan daerah-daerah asal mereka.

Sekitar dua pertiga pengungsi pindah ke hanya empat wilayah – Ternate (pengungsi Muslim), Sulawesi Utara (pengungsi Kristiani), Tobelo (pengungsi Kristiani) dan Jailolo (campuran). Sementara jumlah pengungsi di daerah-daerah lainnya relatif kecil. Di beberapa kecamatan seperti Galela, Gane Timur, Loloda, Kao/Malifut dan Sahu, pengungsi mencakup lebih dari separuh jumlah keseluruhan penduduk. Meskipun hampir seluruh wilayah di Maluku Utara turut terpengaruh oleh konflik, jika dilihat dari sisi pengungsi, tingkat pengungsian jauh lebih besar terjadi di wilayah-wilayah Maluku Utara bagian Utara.

Tidak lama setelah kekerasan mereda, pemulangan pengungsi pertama dicanangkan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak militer dan kelompok-kelompok rekonsiliasi lokal di akhir tahun 2000. Pemulangan agak berkurang di tahun 2001 dan sebagian besar tahun 2002, tetapi meningkat di tahun 2003, diperkirakan berkat kondisi keamanan yang membaik dan kebijakan pemerintah dalam hal pemulangan pengungsi. Sebagian besar pengungsi di Maluku Utara mengungsi lebih kurang selama dua tahun atau lebih. Program-program di masa depan untuk membangun kohesi sosial pasca-pemulangan pengungsi di Maluku Utara harus menargetkan pada tiga kabupaten utama dimana dimana penduduknya telah kembali, yaitu: Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan.

2.2 Sulawesi Tengah (Poso)

Keragaman Sosial dan Populasi

Jumlah keseluruhan populasi di kabupaten Poso sebelum terjadinya pemekaran wilayah di tahun 2003 adalah 275.974 dari 68.151 rumah tangga. Kabupaten Tojo-Una Una (113.756 jiwa) yang baru dibentuk dari bagian timur laut Poso, menyebabkan populasi penduduk Poso berkurang menjadi 162.218 jiwa. Di Kabupaten Poso, penduduk Muslim (57,2%) dan Kristen Protestan (40,2%) merupakan dua kelompok agama dominan, dengan penduduk minoritas Katolik (2%) dan Hindu (0,5%). Di kabupaten ini, Kota Poso berpenduduk mayoritas Muslim dan Tentena memiliki penduduk mayoritas Protestan. Meski sebelum konflik kedua wilayah tersebut komposisinya relatif beragam, tetapi saat ini keduanya hampir secara keseluruhan terpisah berdasarkan perbedaan agama. Meskipun

memang sebelum konflik telah tercatat sejumlah segregasi desa yang cukup signifikan dimana penduduk dari 10 diantara 17 Kecamatan beragama mayoritas, baik Muslim maupun Protestan, di atas 80 persen.

Dari segi suku, populasi Poso terdiri dari kelompok suku Kaili, Pamona, Ta'a, Gorontalo, Bare'e, Bugis, Bada, Togian, dan Jawa. Pemetaan komunitas berdasar agama menunjukkan bahwa komunitas Muslim menetap di wilayah pesisir seperti kota Kota, Poso Pesisir, kota Ampana dan Ampana Tete. Komunitas Kristen Katolik dan Protestan sebagian besar hidup di wilayah pegunungan dan wilayah-wilayah lain selain pesisir. Di provinsi ini juga terdapat umat Hindu Bali yang cukup signifikan, karena terdapat program transmigrasi di Kabupaten Poso.

*Dinamika Konflik di Sulawesi Tengah*¹³

Ulasan singkat mengenai kronologi konflik yang terjadi membantu menggambarkan dinamika konflik serta penyebab-penyebab langsung, maupun yang mendasari terjadinya konflik tersebut. Laporan ini menerapkan konvensi umum dalam mendeskripsikan kerusuhan dalam lima tahapan:

- Tahap 1: Desember 1998 – Awal Tindak Kekerasan – Pada tanggal 24 Desember 1998, di Poso terjadi perkelahian antara seorang pemuda Protestan dan Muslim, yang dengan cepat mengambil nuansa agama dalam beberapa hari setelahnya. Tokoh agama dari kedua kelompok masyarakat melarang beredarnya minuman beralkohol berhubung saat itu adalah bulan Ramadhan. Beberapa kelompok Muslim mulai melakukan penyitaan, yang menjurus kepada perkelahian dengan pemuda Protestan yang melindungi warung warga keturunan Cina yang beragama Kristen yang menjual alkohol. Dengan berkembangnya rumor serangkaian pembakaran gereja, konflik tersebut dengan cepat meluas hingga melibatkan pemuda Kristiani dan Muslim dari beberapa kabupaten sekitar, ditambah dengan milisi Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang bersenjata golok dan ratusan Muslim dari wilayah lain di Sulawesi Tengah yang datang mengendarai truk, dan mengarah ke bentrok

kekerasan yang menyebabkan lebih dari dua ratus orang cedera, sekitar empat ratus rumah warga Protestan dan Katolik terbakar dan sejumlah toko warga Protestan dan Katolik rusak.¹⁴

- Tahap 2: 16 April - 3 Mei 2000 – Pecahnya Konflik Kedua. Ketegangan antara umat Protestan and Muslim kembali terjadi satu setengah tahun kemudian karena kejadian lain yang melibatkan dua pemuda. Menanggapi penusukan seorang pemuda Muslim, segerombolan Muslim mencari kaum muda Protestan dan mulai merusak rumah-rumah Protestan dan Cina, menyebabkan banyak yang melarikan diri ke perbukitan. BRIMOB (Brigade Mobil), polisi huru hara, dipanggil oleh pihak kepolisian Poso untuk menghentikan pembakaran rumah-rumah dan gereja-gereja Protestan. Dalam upaya sementara untuk menghentikan pembakaran tersebut, pasukan Brimob menembak dan membunuh tiga orang Muslim, yang semakin membuat kaum Muslim marah dan menyebabkan mereka kembali ke Palu. Setelah pasukan Brimob meninggalkan Poso, pembakaran rumah kembali terjadi dan tindak kekerasan semakin memuncak. Pada akhirnya, kerusuhan dihentikan dengan pengerahan enam ratus tentara dari Makasar. Tahap kedua konflik setidaknya menyebabkan tujuh orang tewas, 38 cedera, sekitar 700 rumah umat Protestan dan Katolik rusak dan empat gereja terbakar. Tidak seorang pun diganjar hukuman selama kerusuhan Tahap 2.

- Tahap 3: 23 Mei - Juli 2000 – Pembalasan oleh Umat Kristiani. Dua tahapan kekerasan sebelumnya dan tidak adanya penegakan hukum yang efektif, segera diikuti dengan kekerasan tahap ketiga yang menyebabkan lebih banyak lagi umat Muslim yang terbunuh. Pada tahap ini, belasan kelompok 'ninja' dari kelompok masyarakat Kristen menyerang umat Muslim dalam serangan yang menargetkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi sebelumnya. Tiga orang Muslim terbunuh oleh kelompok ini, dan gereja tempat tujuan mereka melarikan diri dibakar. Sejumlah aksi kekerasan terus terjadi antara umat Kristiani dan Muslim, termasuk kejadian di sebuah desa transmigrasi di dekat Kilo Sembilan (lokasi ketegangan antara pendatang Muslim melawan umat Kristiani lokal akibat

¹³ Berdasarkan Laporan PDA Sulawesi Tengah, UNDP Jakarta.

¹⁴ GPST merupakan perwujudan milisi Pamona yang ada di tahun 1950an.

transmigrasi). Pada kejadian ini, banyak kaum lelaki Muslim dari desa tersebut terbunuh (bahkan setelah menyerah) dan kaum perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual, dan ditahan selama beberapa hari bersama anak-anak. Berbagai serangan lain terhadap umat Muslim terjadi selama periode ini. Pada akhirnya menyebabkan kematian antara 300 sampai 800 jiwa, sebagian besar umat Muslim. Perkelahian dapat ditangani setelah pihak militer mengirim sebanyak 1.500 tentara tambahan, sepuluh kendaraan lapis baja, serta satu unit pasukan tempur sebagai tambahan pada pasukan Brimob dari Jawa.

- Tahap 4: Juli 2001 – Desember 2001. Kurangnya upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh mendukung kelanjutan terjadinya kekerasan berskala kecil, sampai para anggota kelompok militan Muslim, Laskar Jihad, tiba. Perkelahian menjadi semakin terorganisasi dan melibatkan senjata-senjata yang lebih unggul, kabarnya termasuk senjata otomatis. Berbeda dengan tahap ketiga dimana banyak umat Muslim yang terbunuh, kedatangan Laskar Jihad menyebabkan lebih banyak kematian di pihak kelompok masyarakat Kristen dan menghasilkan banyak pengungsi. Pada awalnya, pemerintah tidak melakukan apa pun untuk mencegah Laskar Jihad melibatkan diri dalam kerusuhan, bahkan saat tiba mereka bertemu dengan pejabat provinsi dan kabupaten. Laskar Jihad bekerjasama dengan penduduk Muslim dalam membakar musnah desa-desa Kristen satu per satu. Kerusuhan berakhir dengan adanya tambahan pasukan polisi dan militer. Tahap ini menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian dan militer melawan Laskar Jihad dan pejuang Muslim. Pada dua peristiwa yang terjadi di Mapane dan Toyado pihak keamanan (polisi dan militer) dituduh melakukan tindakan balasan yang melanggar hak asasi manusia, dan bukannya menegakkan hukum. Selama tahap ini, setidaknya 141 orang meninggal dunia, 90 cedera, dan lebih dari 2.400 rumah dijarah.

- Deklarasi Malino (Deklama) dan pasca Deklama. Pada bulan Desember 2001, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, mencetuskan kerjasama antara militer dan polisi melalui Operasi Pemulihan Keamanan yang bertujuan untuk: 1) mengakhiri kekerasan, 2) mengusir pihak luar, menyita senjata, dan menegakkan hukum, dan 3) merehabilitasi infrastruktur yang rusak dan rekonsiliasi masyarakat. Pada

saat yang bersamaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama pejabat teras Hankam dan kabinet memulai proses perdamaian Malino pada tanggal 19-20 Desember 2001. Perwakilan dari kedua komunitas agama segera dipilih oleh pimpinan kedua kelompok masyarakat, yang mencerminkan wilayah geografis, suku, profesi, dan kompleksitas konflik. Persetujuan yang muncul dari proses tersebut terdiri dari sepuluh butir utama yang ditujukan sebagian besar untuk mengatasi sebab-sebab langsung dari tindak kekerasan dengan merujuk pada prosedur-prosedur hukum, mengakui hak-hak dan kepemilikan prakonflik, memulangkan pengungsi, dan memperbaiki infrastruktur. Mengikuti kesepakatan Deklama, dilakukan penyitaan senjata dan penegakan keamanan. Ditambah lagi dengan kejenuhan masyarakat terhadap kekerasan, situasi tersebut membantu menjaga situasi keamanan. Sebuah tekanan diberikan untuk menidakanjuti Deklama sehingga terbentuklah Pokja Malino, sebuah kelompok kerja yang memonitor dan membantu penerapan berbagai aspek dari Deklama. Pokja dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk membahas persoalan-persoalan di bidang keamanan, hukum, rehabilitasi mental dan spiritual, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi fisik, pemulangan pengungsi, serta pendidikan dan kesehatan. Kategori-kategori ini kemudian diringkas menjadi kelompok-kelompok kerja tematis seperti berikut: kedamaian dan rekonsiliasi, rehabilitasi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan spiritual. Setelah deklarasi, ditamgah dengan kehadiran pasukan keamanan dalam jumlah besar dan kelelahan masyarakat terhadap konflik, telah mengubah sifat dari tindak kerusuhan menjadi gerakan bawah tanah. Sebagai pengganti dari melakukan perang terbuka antar komunitas, taktik kekerasan telah bergeser menjadi metode-metode teror terarah. Banyak pihak luar yang telah angkat kaki (setelah pembubaran Laskar Jihad). Akan tetapi, peledakan dan penembakan misterius terus berlangsung. Pada bulan Oktober 2003, penembak bertopeng membunuh tiga belas orang di Poso dan Morowali, dan di bulan Maret 2004 sebuah serangan terhadap sebuah gereja telah menewaskan satu orang.

Pemulangan Pengungsi

Situasi keamanan di wilayah Poso dan wilayah korban konflik lainnya seperti di kabupaten Morowali dan Tojo-Una Una yang

baru dibentuk, mengalami kemajuan pesat selama dua tahun terakhir. Situasi keamanan yang membaik ini telah memfasilitasi kepulangan sejumlah besar pengungsi. Proses pemisahan tempat tinggal ini menghasilkan daerah-daerah tertentu menjadi homogen secara agama, contohnya Tentena, yang mengalami penambahan penduduk umat Kristiani dan ditinggalkan oleh hampir seluruh penduduk Muslimnya. Kota Poso sebaliknya mengalami hal yang berlawanan, sehingga menjadi wilayah Muslim total. Daerah-daerah lain telah menampung sejumlah pengungsi yang kembali dalam jumlah lebih besar dan saat ini sebagian besar dari mereka sudah membaur. Dalam keseharian, transportasi bergerak bebas di seluruh wilayah itu, dan individu, baik pedagang, pembeli, atau pengunjung jangka pendek lain, secara umum merasa sepenuhnya nyaman di wilayah 'lawan'. Meski sekitar 40 orang meninggal dalam beberapa serangan terarah sejak akhir tahun 2003, pasukan keamanan lokal dan pejabat pemerintah telah berhasil menangkap hampir, jika tidak semua, tersangka pelaku kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan balasan di tingkat komunitas. Kepulangan para pengungsi, yang sudah melambat, telah sedikit banyak berhenti. Dalam banyak kasus, para pengungsi yang tersisa memutuskan, atau kemungkinan besar akan memutuskan untuk tidak kembali ke tempat asal mereka. Meski bukan tidak mungkin terjadi, tampaknya kerusuhan dan pengungsian besar-besaran tidak akan kembali terjadi dalam waktu dekat.

Rekonsiliasi "Makro"

Dalam banyak hal, akar masalah konflik belum teratasi melalui Deklarna, meski suasana yang lebih damai terlihat cukup kokoh. Ketegangan seputar isu suku dan agama berpotensi muncul dari perdebatan berkepanjangan mengenai lokasi ibukota kabupaten Morowali yang baru dibentuk dan/atau pembentukan provinsi Sulawesi Timur yang akan mencakup paruh timur, yaitu wilayah yang paling menderita dalam kerusuhan di Sulawesi Tengah. Sejumlah responden mengungkapkan adanya potensi 'laten' untuk terjadinya konflik kembali. Sebagai contoh, meski kurang disorot, penduduk Kristen di Pamona masih menganggap diri mereka sebagai korban marginalisasi politik dan ekonomi. Meski pernah sedikit diangkat saat negosiasi Malino, tetapi tidak ada solusi jangka panjang yang ditemukan untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan kabupaten, baik melalui jalan rotasi atau pembagian kekuasaan.

Perasaan adanya hak yang tidak terpenuhi, yang mungkin paling signifikan terlihat di antara para elit Kristen Pomona, semakin diperburuk dengan pembentukan kabupaten Tojo-Una Una di awal tahun 2004. Hal ini mengurangi porsi populasi umat Kristiani di Kabupaten Poso hingga sekitar 30 persen, karena Morowali telah terlebih dahulu dipecah pada tahun 2000. Sama halnya, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi politik Poso untuk mengimbangi perasaan terpinggirkan dan terasingkan ekonomi umat Kristiani dari yang dianggapnya sebagai tanah leluhur mereka. Bantuan pemerintah yang mengalir ke Poso sebagai akibat Malino disalahgunakan oleh berbagai kelompok, yang terkadang dapat digolongkan pada salah satu latar belakang suku, agama, dan/atau wilayah. Keluhan-keluhan ini disertai kritik, baik dari pihak Muslim maupun Kristiani, yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan bersikap lunak terhadap anggota kelompok lainnya. Kedua kelompok merasa menjadi korban kekerasan yang terjadi dan untuk beberapa hal penting tidak puas akan sistem peradilan.

3. Kohesi Sosial di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah

Sudah jelas bahwa konflik kekerasan telah menyebabkan rusaknya kohesi sosial dalam masyarakat dan komunitas Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Namun yang kurang terlihat, adalah sifat dari dampak tersebut pada kohesi sosial dan keragaman ketahanan masyarakat dari satu desa dengan desa lainnya, serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. Bagian ini membahas bagaimana konflik mempengaruhi kohesi sosial di berbagai daerah yang berbeda di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, dan upaya masyarakat untuk memulihkannya kembali. Bagian ini melukiskan gambaran keragaman pengalaman dan potensi untuk mempererat kohesi sosial, pemulihan dan rekonsiliasi di masa mendatang.

3.1 Kohesi Sosial dan Segregasi di Maluku Utara

Umumnya, Maluku Utara lebih dicirikan oleh segregasi ketimbang kohesi sosial. Melalui penggunaan identitas keagamaan selama konflik, agama menjadi saling bertentangan dan identitas agama semakin mengeras di kedua belah pihak. Secara umum, orang yakin bahwa konflik kekerasan komunal tidak akan muncul kembali di Maluku Utara dalam waktu dekat. Responden memberi contoh kerusuhan terakhir yang terjadi pada bulan April 2004 di Ambon, yang tidak memicu ketegangan di Maluku Utara.¹⁵ Secara khusus, Pemerintah Maluku Utara menyelenggarakan dialog tingkat provinsi, sebuah tindakan proaktif yang memainkan peranan penting dalam mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya konflik kekerasan.

Di desa-desa di Ternate, di mana kedua kelompok agama hidup bersama sebelum terjadinya konflik, saat ini terjadi keterpisahan. Di Ternate, terdapat ketidakpercayaan yang kuat terhadap kaum muda. Hal ini sebagai akibat konflik sebelumnya di mana oknum pemuda berlaku sebagai provokator dan pelaku kekerasan. Pada kasus kecamatan Tobelo dan Galela, misalnya, masyarakat mengaku memiliki tingkat kepercayaan, asosiasi, dan kegiatan bersama yang tinggi sebelum konflik,

namun hubungan sosial dan kepercayaan tersebut telah jauh berkurang walaupun banyak pengungsi telah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Kegiatan olahraga seperti sepakbola di Jailolo dan bola voli di Kao atau Malifut, dulu merupakan bentuk asosiasi populer antar komunitas. Sayangnya perkumpulan semacam ini tidak berlanjut lagi setelah konflik. Yang menarik, di desa-desa di mana hukum adat masih kuat, seperti pada desa-desa adat di Kecamatan Sahu dan Jailolo (Halmahera Barat), kepercayaan dan asosiasi antar kelompok masih dapat ditemukan dan kohesi sosial tetap terjaga bahkan setelah terjadinya konflik. Meskipun, sistem adat cenderung memiliki keterbatasan dan hanya berlaku untuk urusan internal komunitas.

Bukti yang ditemukan selama pengkajian di ketiga kabupaten ini, mengindikasikan kurang adanya integrasi setelah kepulangan dan bahwa membangun hubungan sosial antar kelompok yang terlibat dalam konflik belum mendapat perhatian yang cukup. Seperti yang dikatakan seorang pekerja sosial yang berpengalaman, *“keadaan tampak dinormalkan di sebagian besar tempat, tapi keadaan belum kembali normal”*. Secara umum pengungsi telah kembali ke daerah mereka masing-masing, meskipun mereka pindah ke desa-desa tetangga yang memiliki kesamaan latar belakang agama. Fasilitas umum seperti sekolah-sekolah saat ini secara efektif hanya dinikmati oleh penduduk dengan satu latar belakang agama saja. Masalah-masalah sosial lainnya juga muncul seiring dengan kembalinya para pengungsi sehingga menimbulkan ketegangan, khususnya jika mereka berasal dari suku atau agama yang berbeda.

Beragamnya dampak konflik di Maluku Utara terhadap kohesi sosial di satu daerah dengan daerah lainnya memerlukan pengamatan yang lebih dalam lagi. Bagian berikut ini menyediakan pandangan yang lebih rinci mengenai kohesi sosial di tiap-tiap daerah yang dikunjungi tim kajian untuk mengetahui lebih jelas pengaruh konflik serta upaya untuk pemulihan dan rekonsiliasi.

¹⁵ Alasan utama yang diberikan adalah bahwa masyarakat telah jenuh dan tidak yakin bahwa kekerasan akan memberikan mereka manfaat apapun.

Kota Ternate

Sebelum konflik, kelompok suku Ternate mempunyai hubungan baik dengan kelompok suku Makian. Selama konflik di Ternate, hampir semua pelaku kekerasan adalah pemuda. Orang dewasa, khususnya yang menghormati adat, tidak terlalu terlibat. Banyak masyarakat Makian tidak mendukung konflik dan menyesalkan keterlibatan suku Makian. Lebih dari itu, mereka percaya bahwa persoalan politik merupakan alasan utama dari konflik dan orang menyalahgunakan isu Makian atau non-Makian serta identitas Islam-Kristen. Setelah konflik, terdapat peningkatan rasa tidak percaya terhadap kaum Makian di Ternate, walaupun masyarakat Ternate memiliki hubungan-hubungan pribadi dengan kaum Makian dan mempercayai mereka di tingkat personal. Di sisi lain, masyarakat Ternate Islam dan Kristen memiliki berbagai pengalaman yang berbeda, khususnya dilihat dari tingkat kepercayaan antar mereka. Di Desa Kotabaru, misalnya, masyarakat Muslim melindungi masyarakat Kristiani, sementara di Sulamadha, Ternate Selatan, orang Islam memindahkan semua orang Kristiani ke Puskesmas sebagai tindak penyelamatan setelah rumah orang-orang Kristen menjadi sasaran tindak pengrusakan.

Walaupun masyarakat dari kelompok suku dan agama yang berbeda mungkin saja memiliki kepercayaan pada tingkat personal, masyarakat cenderung menghindari pertanyaan mengenai identitas kelompok dan “orang lain” (contohnya, Islam, Kristen, putih, kuning, merah), yang menunjukkan terbatasnya kepercayaan dan kohesi sosial di tingkat komunitas dan kelompok. Umat Kristiani di Ternate cenderung bersikap hati-hati dalam menjawab pertanyaan mengenai kohesi sosial dan konflik karena mereka masih merasa berada dalam situasi yang rentan. Perempuan dan orang tua takut ditanya mengenai agamanya serta merasa tidak aman karena pertanyaan tersebut. Sampai sejauh ini belum ada inisiatif untuk membangun kembali tempat-tempat ibadah, sehingga masyarakat menggunakan bangunan umum seperti markas polisi dan militer untuk beribadah. Pemerintah Kota Ternate bertindak sebagai fasilitator rekonsiliasi di beberapa desa dan telah berhasil membuka komunikasi. Akan tetapi, masyarakat percaya bahwa kegiatan sehari-hari

masyarakat di kota Ternate adalah mediator terbaik bagi proses rekonsiliasi dan bahwa rekonsiliasi sebaiknya terjadi secara alami dalam komunitas ketimbang dipaksakan oleh pihak luar. Aktivis dan LSM prihatin bahwa situasi di Ternate saat ini tidak akan bertahan dan bahwa pemerintah perlu menyelesaikan masalah pengungsi, pemerintahan yang buruk, kurangnya peluang ekonomi dan pengangguran di kalangan kaum muda.

Kecamatan Kao – Malifut

Terdapat tingkat ketidakpercayaan dan ketegangan yang tinggi antara masyarakat Kao dan Malifut. Secara internal di dalam komunitas Kao, hubungan antara umat Muslim dan Kristiani lebih kuat setelah konflik karena mereka menganggap persoalannya adalah kaum Makian di Malifut ketimbang alasan agama. Masyarakat Kao tidak lagi membicarakan ‘islamisasi’ namun mereka masih mengeluh tentang pemberian nama kecamatan baru Malifut berikut nama-nama desanya. Namun demikian, status kelima desa tersebut, yang secara resmi berada di kecamatan Malifut masih belum jelas dan menimbulkan tekanan bagi penduduk kelima desa tersebut untuk memilih masuk di kecamatan yang mana. Indikator dari ini ialah adanya kasus seorang perempuan dari salah satu dari kelima desa tersebut yang dilaporkan mengalami diskriminasi ketika meminta perawatan kesehatan. Seorang tokoh masyarakat Malifut prihatin dengan persoalan ini dan khawatir dapat memicu lebih banyak ketegangan dalam wilayah tersebut.

Akses pekerjaan di tambang emas setempat merupakan isu lain di mana penduduk lokal Kao menganggap pendatang baru suku Makian menerima perlakuan yang lebih baik. Hal ini menimbulkan rasa benci dan mempengaruhi hubungan sosial di wilayah tersebut. Tambang emas tersebut menanggapi dengan menyumbangkan dana pembangunan bagi masyarakat, yang akan dikelola oleh ‘Tim 13’, sebuah kelompok yang terdiri dari pemuda (25-38 tahun) dari Kao maupun Malifut. Tim ini telah menerima tiga miliar rupiah (kira-kira US\$350.000) dari perusahaan tersebut dan saat ini sedang dibicarakan bagaimana mereka akan mempergunakan dana tersebut. Masyarakat Kao mengharapkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk membangun kembali prasarana listrik, sedangkan masyarakat

Malifut ingin memanfaatkan dana tersebut untuk membangun kembali gedung-gedung sekolah beserta fasilitas-fasilitasnya. Untungnya, tim tersebut sepakat untuk mendistribusikan dua miliar rupiah untuk kecamatan Kao dan satu miliar rupiah untuk kecamatan Malifut.

Akses Atas Pekerjaan dan Kohesi Sosial

Di Tobelo, lebih dari empat ratus orang bekerja memuat kapal di pelabuhan. Enam puluh persen di antaranya adalah penduduk lokal dari Tobelo, sedangkan empat puluh persen sisanya adalah bekas pengungsi yang lari ke Morotai, Tobelo Selatan, Weda, Galela, dan Loloda. Akibat konflik, total aktivitas di pelabuhan telah berkurang dari rata-rata harian seberat 250 ton per hari dimuat dan dibongkar sampai hanya 30 ton per hari. Akibatnya, pelabuhan tersebut hanya memperkerjakan seratus pekerja harian, sementara sisanya bekerja hanya dua kali sebulan. Namun demikian, pekerja-pekerja harian ini kebanyakan penduduk lokal beragama Kristen dari Tobelo, sedangkan banyak dari pekerja yang bekerja dua kali sebulan beragama Islam, yang merasa didiskriminasi. Meski pelabuhan dapat dijadikan tempat bagi warga Kristen dan Islam untuk bekerjasama, menjalin persahabatan, dan memperbaiki hubungan antar komunitas, situasi saat ini menunjukkan bahwa pelabuhan juga menjadi tempat penyebab munculnya ketegangan sosial ketimbang kohesi sosial, yang seharusnya segera ditangani oleh Pengelola Pelabuhan.

Kajian ini tidak menemukan adanya banyak perkumpulan antarkelompok atau kelompok-kelompok dalam kedua komunitas tersebut sebelum terjadinya konflik pada tahun 1999. Satu-satunya perkumpulan yang dikemukakan seorang tokoh pemuda Kao adalah pertandingan bola voli tahunan, namun ini berhenti ketika konflik dimulai. Salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai mengemukakan tingginya rasa enggan untuk duduk bersama.

Kecamatan Tobelo – Galela

Meskipun masyarakat bebas bergerak antara Galela dan Tobelo, jelas terdapat ketegangan antara penganut Islam dan Kristen di sana. Di kota Tobelo, aktivitas sehari-hari dapat menyembunyikan perasaan yang terpendam namun masyarakat mengatakan bahwa mereka merasakan ketegangan itu saat mereka keluar dari kota. Seorang tokoh agama Kristen di desa Soakonora kecamatan Galela mengemukakan bahwa meskipun ia dapat pergi ke ladangnya dan bekerja di dalam desa

Muslim, ia belum ingin membangun rumahnya kembali karena masih merasa tidak aman. Di desa Duma, seorang petani menyatakan pada tim kajian bahwa ia merasa aman untuk kembali ke desanya walaupun baru menjalin sedikit hubungan dengan petani setempat, yang jarang menjalin hubungan kembali dengannya. Seorang petani lainnya menjelaskan bahwa sebelum konflik ia dibantu oleh organisasi setempat yang memperkenalkannya pada metode-metode pertanian baru, sedangkan petani lain dari desa yang sama namun berbeda agama mengeluh bahwa ia sama sekali tidak menerima bantuan apapun. Anggapan bahwa bantuan hanya diberikan pada salah satu kelompok dalam masyarakat dan tidak untuk kelompok lainnya merupakan sumber kebencian dan ketegangan yang dalam.

Di Galela dan Tobelo, pihak militer dan pemerintah daerah membentuk tim rekonsiliasi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan agama untuk memfasilitasi rekonsiliasi. Tim rekonsiliasi ini dikatakan menggunakan pendekatan rekonsiliasi dari atas-ke-bawah karena para pemimpin melakukan pertemuan, mengambil keputusan, dan baru setelah itu memberitakannya ke desa-desa. Tim rekonsiliasi berfungsi baik untuk menghentikan pertempuran namun belum jelas apakah mereka dapat menumbuhkan kepercayaan di antara masyarakat. Tim rekonsiliasi juga telah mencoba menggunakan simbol rumah adat sebagai medium untuk mempersatukan masyarakat, namun rencana untuk membangun rumah adat yang melambangkan kesatuan masyarakat ini belum diselesaikan. Secara keseluruhan, membangun kohesi sosial tetap menjadi prioritas di wilayah Tobelo-Galela.

Kecamatan Jailolo and Sahu

Situasi di Kecamatan Jailolo dan Sahu ditandai oleh kepercayaan dan kerjasama sampai taraf tertentu, yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dan kegiatan sehari-hari. Di Sahu, ikatan adat dan kekeluargaan berlaku sebagai medium kohesi sosial di dalam dan antara desa-desa. Perkumpulan keagamaan, adat, olahraga, dan pemuda cukup eksis. Di sana terdapat beberapa perkumpulan antarkelompok di desa-desa, termasuk yang bersifat keagamaan, adat, dan pemuda, yang sudah melanjutkan kegiatan rutinnnya. Walaupun demikian, terdapat perasaan anti-Makian yang kuat antara penduduk setempat.

Orang Makian berada di posisi yang dominan di dalam pemerintahan kabupaten yang baru dan masyarakat menuntut lebih banyak kesempatan bagi penduduk setempat untuk memerintah dirinya sendiri. Persoalan pokok dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi adalah pembangunan kembali fasilitas umum seperti sekolah-sekolah dan tempat ibadah. Pihak yang berpotensi membangun perdamaian dan rekonsiliasi adalah tokoh adat, agama (pendeta dan imam), pemuda, dan tokoh masyarakat. Adat dan pengawasan yang dilakukan Kesultanan Ternate merupakan mekanisme yang berpotensi untuk pencegahan konflik.

Identitas suku Sahu mengikat masyarakat desa Soakonara sebagai satu keluarga melewati batas identitas keagamaan. Soakonara merupakan desa adat yang terdiri dari masyarakat kelompok suku Sahu, yang bersekutu dengan kesultanan Ternate. Desa ini terdiri dari empat dusun, dua dusun Kristen (Soakonara dan Jati) dan dua dusun Islam (Kusumadehe dan Hatibicara). Sebelum konflik terdapat beberapa keluarga Kristen di dusun Hatibicara, namun setelah konflik mereka pindah ke dusun Soakanara. Rumah-rumah, bangunan-bangunan umum dan tempat ibadah dihancurkan selama konflik dan bantuan pemerintah memungkinkan sekitar 75% tempat tinggal dibangun kembali, namun tidak bagi infrastruktur komunitas lainnya seperti sekolah. Masyarakat membangun kepercayaan melalui kontak sehari-hari dan penyebaran gagasan 'satu keluarga dan adat'. Masyarakat Kristiani maupun Muslim sadar akan peran 'orang luar' yang menghasut untuk bertempur selama konflik, dan mereka yakin tidak akan terprovokasi lagi di masa mendatang, walaupun mereka belum menciptakan mekanisme apapun untuk mendukung hal ini. Pemuda menjalankan peran yang penting dalam menghidupkan kepercayaan dan persahabatan melalui kegiatan olahraga dan kesenian. Di Fortini, desa adat lain dengan identitas suku Sahu yang kuat, institusi dan mekanisme adat (*sabua*) dapat mengatur serta mengendalikan desa dengan baik, dan masyarakat yakin mereka dapat mencegah konflik atau pertengkaran di masa mendatang.

Di Tacim, sebuah desa adat Muslim di bawah kesultanan Ternate, masyarakat tidak

merasa aman atau mempercayai desa-desa Kristen di sekitarnya pada awal proses pemulangan karena rumah-rumah dan harta benda mereka telah hancur. Tetapi melalui interaksi sehari-hari dan penyebaran terus menerus mengenai ide 'satu keluarga Sahu', masyarakat mulai membangun kepercayaan antara satu dengan lainnya. Namun tidak ada satu proses rekonsiliasi pun di mana orang dapat bebas berbicara mengenai kemarahan, kebencian, dan ketakutan. Kepala Desa Tacim adalah seorang perempuan yang telah menjadi kepala desa tersebut selama 12 tahun. Ia menunjukkan bahwa tidak ada tabu bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik selama mereka memiliki kemampuan.

Bertolak belakang dengan keadaan Soakonara dan Tacim, masyarakat dari desa transmigrasi campuran, Acango, melihat pemerintahan desa sebagai satu-satunya institusi yang dapat menyelesaikan perselisihan. Pendatang di Acango berasal dari Jawa, Tondano, Sunda, Palu, Gorontalo dan bagian-bagian lain di Maluku Utara. Terdapat beberapa perkumpulan di desa ini seperti: PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), organisasi pemuda Karang Taruna dan perkumpulan agama. Rasa saling percaya terasa kuat dalam masyarakat desa karena mereka memiliki solidaritas sebagai kaum pendatang. Tetapi masyarakat Acango masih merasa takut akan desa-desa tetangga karena Acango bukan merupakan desa adat dan tidak memiliki ikatan tradisi atau keluarga dengan tetangganya. Oleh sebab itu mereka hanya bisa berharap pemerintah dan pasukan keamanan dapat menjamin keselamatan dan keamanan mereka.

Kabupaten Halmahera Selatan

Di Halmahera Selatan, sebagian besar masyarakat telah kembali ke desa mereka dan umat Muslim maupun Kristiani menjalani kegiatan sehari-hari di wilayah yang bercampur. Di Labuha ada pasar baru yang sedang dibangun yang akan memudahkan akses bagi pedagang dan pembeli dari kedua komunitas. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan ruang dan tempat umum bagi kohesi sosial. Tidak jelas sejauh mana pedagang pasar dari kedua komunitas memanfaatkan fasilitas baru ini, dan terlihat pedagang Kristiani cenderung melakukan transaksi dengan pedagang Muslim di pasar

ketimbang menunggu sendiri barang dagangannya di pasar dan menjual langsung kepada konsumen. Di desa-desa pesisir, nelayan belum siap berpergian jauh dari desanya saat melaut dan walaupun mereka bebas berpergian di dalam wilayah kecamatan, hubungan dengan penduduk desa lain masih terbatas.

Meskipun di permukaan semuanya terkesan normal, di banyak tempat ketegangan dan trauma masih mempengaruhi masyarakat karena mereka cenderung memandang kelompok agama lain sebagai “pihak lain”. Di Obi, perempuan takut menyebutkan nama-nama mereka yang terlibat dalam konflik karena mengira polisi akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Ternate. Menariknya, tim juga menemukan banyak contoh di Halmahera Selatan di mana warga Muslim dan Kristiani setempat saling membantu selama dan setelah konflik. Contohnya, warga Muslim di Bacan melindungi tetangga-tetangga Kristiani mereka selama konflik, sebagian karena mereka telah membuat perjanjian awal untuk tidak saling menyerang. Meskipun pada akhirnya karena tekanan dari kelompok luarlah yang memicu terjadinya penyerangan dengan menyebabkan sedikit kematian namun banyak menimbulkan kerusakan harta milik serta pengungsian.

Ikatan kekeluargaan juga dapat berpengaruh besar bagi kohesi sosial. Lata-lata, contohnya, merupakan desa adat di mana masyarakat setempat hidup sebagai ‘keluarga adat’ yang terdiri dari warga Muslim maupun Kristiani dengan ikatan persaudaraan yang kuat yang melintasi identitas keagamaan. Selama konflik, umat Kristiani melarikan diri ke hutan dan beberapa keluarga Muslim lari ke Ternate. Setelah sekitar satu bulan, warga Kristiani kembali ke desa dengan bantuan kepala desa yang Muslim karena mereka dibutuhkan untuk membantu panen. Ketika kembali mereka menjadi penganut Islam, namun tanda salib dan kekristenan tidak lagi dianggap tabu sehingga beberapa orang telah kembali menjadi penganut agama Kristen, sedangkan sekitar 20 keluarga tetap menganut agama Islam.

Kecamatan Maba Selatan

Maba Selatan adalah kecamatan di Halmahera Timur, yaitu kabupaten hasil

pemekaran yang sebelumnya merupakan kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah. Daerah ini kaya akan sumber daya alam termasuk pertambangan, kehutanan, dan perikanan namun memiliki infrastruktur yang buruk yang menyulitkan perjalanan dan transportasi melalui darat maupun laut. Di bawah kekuasaan kesultanan Tidore, dua kelompok suku, Maba dan Buli, mendominasi penduduk Maba Selatan yang hanya terdiri dari 9.215 jiwa. Masyarakat Maba lebih banyak yang beragama Islam, sedangkan kelompok Buli beragama Kristen. Keduanya memakai bahasa yang berbeda namun dapat saling mengerti. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, tujuh desa Muslim, dan dua desa campuran. Di dalam desa campuran, desa induknya adalah Islam, dan penduduk Kristen dan Islam tinggal di dusun yang berbeda. Di desa Bicoli terdapat kelompok masyarakat pendatang asal Papua, keturunan dari budak Kesultanan Ternate, dan direndahkan sebagai kelas terendah dan tidak diikutsertakan sebagai pemimpin komunitas.

Tidak ada konflik langsung di Kecamatan Maba Selatan. Sebagian alasannya adalah karena daerah ini terpencil dan sulit dicapai dan alasan lainnya adalah adanya rasa sebagai satu keluarga yang cukup kuat. Saat berlangsungnya konflik, kaum Muslim melindungi daerah kaum Kristen dari pasukan Jihad dari luar karena adanya hubungan adat yang kuat antara penganut Kristen dan Islam di Maba Selatan. Kepala desa adalah tokoh adat yang berperan efektif dalam mencegah konflik kekerasan di masyarakat tersebut dengan mengingatkan masyarakat bahwa mereka adalah satu keluarga di bawah adat Kesultanan Tidore. Namun demikian, Maba Selatan bukannya tanpa konflik dan ketegangan. Isu sumber daya alam dan sengketa tanah dan pembayaran kompensasi merupakan persoalan penting dan terdapat kebencian mendalam akibat nepotisme dalam perekrutan pegawai negeri dalam pembentukan pemerintahan kabupaten yang baru. Pertambangan juga merupakan lapangan pekerjaan yang penting, menyediakan sekitar 6.400 pekerjaan di kabupaten yang hanya terdiri dari 60.000 penduduk. Namun demikian, diperkirakan hanya sepertiga dari pekerjaan ini diisi oleh penduduk setempat sementara mayoritas pekerja tambang berasal dari luar kabupaten. Ketegangan ini perlu diatasi, dan asosiasi adat

dan ekonomi mempunyai potensi terbesar untuk memperkuat kohesi sosial di Maba Selatan.

3.2 Kohesi Sosial dan Segregasi di Sulawesi Tengah

Dua tahun sejak Deklarasi Malino, berbagai bentuk interaksi sehari-hari, ikatan asosiasi, dan upaya “rekonsiliasi” secara tidak langsung telah berhasil membangun kembali kohesi sosial dalam masyarakat yang terimbas konflik di seluruh Kabupaten Poso, Morowali dan Tojo-Una Una. Walaupun begitu, sejumlah tempat tetap tersegregasi menurut garis suku dan agama. Bagian ini mengilustrasikan pola dan sifat kohesi sosial di lokasi-lokasi yang didatangi selama kajian ini.

Kecamatan Poso Pesisir

Tambarana-Trans adalah desa transmigrasi yang terletak antara Tambarana yang sebenarnya dan Tomora di sepanjang jalan raya Trans-Sulawesi sepanjang pantai kecamatan Poso Pesisir.¹⁶ Desa ini berpenduduk kurang-lebih 1.400 jiwa, 95 persen diantaranya adalah pendatang dari Jawa, Bali, dan Jakarta, sementara lima persen sisanya merupakan penduduk Keili setempat, yang adalah penganut agama Kristen maupun Islam. Bersama dengan dua desa tetangganya, Tambara-Trans berhasil menghindari kekerasan skala besar sejak dimulainya konflik. Kemungkinannya adalah merupakan berkat dari tradisi gotong royong yang dipraktekkan sejak lama, dimana pada tahun 1980 sebagai lokasi transmigrasi, penduduk telah mempraktekkan gotong royong untuk membersihkan lahan sawah dan membangun sistem irigasi.

Organisasi kunci di wilayah Tambarana adalah FKAUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama). FKAUB memainkan peran penting dalam mengukuhkan oposisi lokal terhadap provokasi atau serangan dari luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan lokal yang dapat menimbulkan konflik internal. Forum tersebut didirikan oleh kelompok yang terdiri dari 13 tokoh terkemuka setempat, dipimpin oleh ketua Muhammadiyah cabang Tambarana. Sejak saat itu FKAUB telah meresmikan strukturnya, yang di Tambarana-

Trans mengikut sertakan kepala desa, Babinsa (petugas non-perwira dari Angkatan Darat) dan dua tokoh agama terkemuka dari masing-masing komunitas agama (Islam, Hindu, dan Protestan). Sejak berdirinya, FKAUB telah menangani provokasi serius, perselihan dan ketegangan skala kecil, dan telah mensponsori berbagai kegiatan untuk memudahkan interaksi sosial antar penduduk dari beragam latar belakang di desa-desa sekitar. Banyak rumah di tiga desa tersebut juga memasang papan tanda FKAUB dengan slogan-slogan yang mendukung perdamaian. Karena terkesan dengan kesuksesan FKAUB di Tambarana dan sekitarnya, komandan militer setempat memperkenalkan struktur ini di desa-desa lain sekitar Poso. Namun demikian, pengembangan FKAUB dengan pola dari atas-ke-bawah seperti ini tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan lokal di daerah lain.

Karena menghabiskan banyak waktu di sawah, penduduk desa tidak mempunyai banyak waktu mengikuti kegiatan organisasi atau rekreasi yang menghimpun berbagai kelompok bersama. Namun demikian, terdapat sebuah sistem aktif yang terdiri dari lima kelompok tani, masing-masing beranggotakan 25 orang dari kelompok suku dan agama yang berbeda. Hari-hari pasaran adalah Rabu dan Sabtu, tapi sampai saat ini belum ada organisasi lokal untuk pemilik toko atau pedagang pasar. Terdapat beberapa kelompok arisan di antara kaum perempuan Muslim dan kelompok gereja bagi kaum perempuan Kristiani. Sementara perkumpulan “non-agama” untuk perempuan dan pemuda yang diponsori oleh pemerintah seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok semi-formal pemuda Karang Taruna selama ini tidak aktif. Bagi kaum muda, kesempatan utama untuk berinteraksi tampaknya adalah olahraga. Setiap sore, pemuda setempat bermain sepakbola, bola voli dan bulu tangkis di lapangan setempat. Menurut seorang gadis remaja, tidak ada “tempat bergaul” khusus untuk anak muda, sehingga ia dan teman-temannya hanya bertemu di jalan atau di rumah masing-masing. Pantai terdekat, dermaga pemancingan, dan sumber air panas adalah tempat-tempat rekreasi utama di Sabtu malam dan hari Minggu.

Keadaan yang bertolak belakang dari Tambarana dapat ditemui di Pinadapa-Saatu-

¹⁶ Bersama dengan empat desa lainnya, ketiga desa ini akan dimasukkan dalam satu kecamatan baru, yaitu Poso Pesisir Barat.

Masamba, sebuah kompleks yang terdiri dari tiga desa yang berdampingan yang juga melintasi jalan Trans-Sulawesi di kecamatan Poso Pesisir. Tiga desa ini terdiri dari kaum Bugis Muslim yang menetap di Masamba sejak tahun 1940-an, kaum Pamona Kristen setempat (awalnya berasal dari sub-kelompok Pebato) dan campuran kelompok-kelompok lain termasuk Toraja Kristen, Keili Islam dan Jawa. Kira-kira setengah dari penduduk tiga desa tersebut telah kembali dari tempat-tempat pengungsian mereka namun yang lainnya belum kembali, terutama sejumlah besar orang Pamona Kristen dan orang Jawa yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Meski tempatnya berdekatan dan ada niat baik serta usaha untuk membaaur secara non-formal, hubungan desa-desa yang berdampingan ini menunjukkan jarak sosial yang sangat lebar. Masyarakat berbicara lugas tentang perasaan “trauma” akibat kurangnya keamanan. Mengumpulkan coklat misalnya, kabarnya dilakukan hanya dalam kelompok-kelompok kecil yang selalu pulang jauh sebelum petang tiba. Pembunuhan-pembunuhan terakhir meningkatkan ketakutan, menyebabkan pengungsian jangka pendek, menunda pemulangan lebih lanjut, dan menimbulkan kecurigaan yang menghalangi usaha rekonsiliasi. Pada tahun 2003 didirikan, cabang FKAUB untuk menangani tiga desa tersebut dan juga daerah-daerah terdekat lainnya. FKAUB setempat sebagian besar hanya sebatas mengadakan pertemuan umum dan membuat papan-papan tanda dengan slogan berorientasi perdamaian untuk dipasang di depan rumah-rumah. Selain aktivitas tersebut di atas, tidak ada lagi aktivitas lainnya sejak didirikan. FKAUB juga gagal mengambil peran publik untuk meyakinkan penduduk setelah terjadinya pembunuhan bulan Oktober.

Walaupun tidak secara sengaja diterapkan, pemisahan secara suku dan agama telah mempengaruhi kegiatan sekolah dasar. Tiga siswa Islam dari desa paling barat, Pinadepa, harus melintasi Saatu untuk dapat bersekolah di Masamba yang terletak di ujung Timur bersama 100 murid Islam lainnya. Sebaliknya, SD di Saatu, sebuah SD Negeri yang diatur pemerintah, memiliki tujuh guru untuk 30 murid, yang semuanya adalah orang Pamona Kristen. Saat ditanyai secara informal oleh tim, 10 penduduk Saatu, semuanya Kristen, tidak

dapat menyebutkan satupun tokoh terkemuka dari Masamba di sebelahnya, yang beragama Islam. Serupa dengan itu, masing-masing desa memiliki kelompok tani yang terpisah. Gotong royong (di Panoma dikenal dengan istilah *mesale*) cenderung diatur dalam kelompok suku-agama dan kelompok arisan perempuan tampaknya hanya terdapat di Masamba dan Pinadepa yang Muslim. Sumber jaringan kerjasama dan kontak lainnya seperti PKK sudah tidak aktif.

Namun demikian, ada beberapa tempat yang signifikan untuk berinteraksi dan meningkatkan kerjasama. Hubungan keseharian antar kelompok suku dan agama yang berbeda dikabarkan cukup menjamin umat Kristiani untuk pergi ke pasar di daerah mayoritas Islam seperti Kasiguncu dan kota Poso. Panen padi, yang berlangsung dua kali setahun, bergantung pada tenaga dari ketiga desa tersebut, dan kelompok pekerja diatur bersama (meskipun pekerja dibayar Rp 30.000 per hari). Perayaan keberhasilan panen padi, dikenal di Pamona dengan istilah *padungku*, membawa semua orang kembali bersama-sama, dan antar keluarga telah kembali saling melakukan kunjungan informal pada kesempatan-kesempatan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Sistem irigasi bagi ketiga desa – dan termasuk tiga desa lain yang berdekatan – perlu diperbaharui karena berpotensi mempersatukan beragam kelompok suku dan agama.

Kecamatan Tojo Barat

Desa campuran Matako di Kecamatan Tojo, sebelah Timur kota Poso ke arah Ampana, memiliki hubungan yang dekat dengan sejumlah desa terdekat, yaitu Malei-Tojo (Islam) dan Malei-Lage (campuran) ke arah barat menuju Poso dan Bambalo ke arah Timur dan Ampana.¹⁷ Terdiri dari lima dusun yang berdampingan sepanjang jalan dari Poso ke Ampana, Matako sendiri merupakan desa yang sepenuhnya campuran antara penganut Kristen dan Islam dari berbagai kelompok suku. Ini termasuk Pamona dan Cina Kristen, muslim asal Bugis dan Gorontalo, dan Keili dari kedua agama. Matako merupakan contoh yang menonjol akan solidaritas antar kelompok

¹⁷ Walaupun kurang dari 30 kilometer dari kota Poso, Matako terletak di kecamatan Tojo Barat, sekarang bagian dari Kabupaten Tojo Una-Una yang baru.

yang terbina sejalan dengan waktu dan tidak terbawa perselisihan internal atau terjadi penyusupan dari luar selama konflik. Serangan yang datang dari pihak luar di tahun 2000 dan 2001 memaksa penduduk desa – dari semua kelompok suku dan latar belakang agama – untuk meninggalkan rumahnya. Penduduk desa dengan bangga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perselisihan internal yang berakibat kekerasan atau yang dimanfaatkan pihak luar untuk memecah-belah masyarakat. Justru, sekitar 40 rumah yang dibakar pada tahun 2001 adalah milik orang Islam maupun Kristen yang tinggal di dusun yang sama.

Hubungan selama ini sangat positif dan penduduk desa merasa sepenuhnya bebas bergerak dan berinteraksi dengan orang dari latar belakang lain. Pasar Minggu Matakko sudah berfungsi sepenuhnya dan saat ini menarik pedagang dari luar termasuk suku Bugis dari Poso. Tidak seperti sebelumnya, nelayan Kristen saat ini merasa cukup aman untuk membawa kapalnya ke laut. Penduduk desa dari kedua agama merasa bebas berpartisipasi dalam *dero*, tarian kontemporer berdasarkan bentuk-bentuk tradisional. Namun, tradisi ini ditentang oleh kelompok Islam garis keras karena terlalu memperbolehkan kontak antara laki-laki dan perempuan.

Tingkat solidaritas, toleransi, dan rasa saling percaya yang tinggi ini disebutkan sebagai hasil dari sejumlah faktor. Pertama, kepala desa, yang telah bertugas luar biasa lama (empat kali berturut-turut selama 19 tahun), secara luas digambarkan sebagai pemimpin yang adil, bertanggungjawab, dan menghormati agama, yang dikabarkan menggunakan kekuasaannya untuk secara efektif berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan perwakilan militer di desa tersebut dan untuk mendisiplinkan pihak yang berpotensi membuat onar, seperti pemuda berandal, maling, atau pemabuk. Kedua, detasemen Brimob setempat mampu bersikap netral selama periode-periode tegang saat ancaman serangan luar membayangi. Terakhir, Matakko sepertinya memiliki beragam ikatan asosiasi dan kerjasama yang melintasi batasan suku dan agama termasuk (a) delapan kelompok tani, yang masing-masing terdiri dari 10 petani dari latar belakang suku dan agama yang berbeda, (b) sekolah campuran, (c) ronda gabungan Islam dan Kristen bersama dengan

pasukan keamanan, (d) kerja bakti seperti membersihkan desa setiap Senin dan Sabtu, (e) kelompok kerja kecil untuk pergi ke hutan atau kebun coklat bersama, dan (f) kerjasama nonformal di kalangan perempuan, contohnya kelompok campuran yang terdiri dari 10 perempuan bekerjasama untuk mengumpulkan daun *nipa* dan membuat topi *toru* untuk dijual ke tetangga-tetangganya.¹⁸

Kecamatan Tentena – Pamona Utara

Dengan penduduk sebelum konflik sebesar 30.000 jiwa, Pamona Utara dan khususnya kota utamanya Tentena telah menjadi daerah utama penerimaan pengungsi Pamona Kristen dari daerah-daerah mayoritas Islam. Di tahun 2000 dan lagi di 2001, penganut Kristen meninggalkan kota Poso dan kecamatan tetangga Poso Pesisir, Lage dan Tojo. Pada puncak masa pengungsian, Tentena menampung puluhan ribuan pengungsi, yang saat ini telah berkurang menjadi sekitar 15.000 jiwa. Gelombang besar pengungsi ini sangat berpengaruh pada Tentena dan mengokohkan Tentena menjadi daerah yang hampir sepenuhnya Kristiani dan sebagian besar orang Pamona. Kecenderungan ini bertambah ketika pada tahun 2000 terjadi konflik di Kota Poso dan komunitas pesisir yang menyebabkan menyingkirnya hampir semua penduduk Muslim Tentena.

Untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi pengungsi yang tersisa, khususnya mengenai kesulitan pemulangannya, tim pengkaji mengunjungi dua tempat pengungsian: Posunga (di mana pengungsi dari Malei-Lage telah membangun rumah-rumah semi-permanen di tanah yang disewakan tuan tanah Pamona) dan Later (di mana pengungsi dari berbagai desa pesisir juga telah membangun rumah-rumah permanen di lapangan terbang milik gereja Protestan). Banyak pengungsi jangka panjang di daerah tersebut merasa sangat ragu untuk kembali ke

¹⁸ Upaya untuk mempererat ikatan dalam komunitas termasuk (i) Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako, baru-baru ini memelopori pertemuan rekonsiliasi di Matakko, diikuti oleh mantan pejuang dari daerah Poso dengan partisipasi pemuda dari Matakko dan desa-desa sekitar, (ii) sekolah dasar campuran dengan dana awal dari LSM Nurani Dunia yang berpusat di Jakarta, yang meliputi komite manajemen sekolah (BP3) campuran yang juga menggabungkan orang tua Muslim dan Kristiani.

desa pesisir mereka atau untuk menetap secara lebih permanen di Tentena, dan merasa sangat kecewa, jika tidak sepenuhnya tereksploitasi, dengan janji-janji palsu yang diberikan pemerintah mengenai situasi keamanan dan jumlah bantuan bagi mereka (lihat kotak). Dalam nada yang lebih positif, mereka tetap terbuka, meskipun pasif, terhadap usaha meningkatkan interaksi dan kerjasama antarkelompok.

Bategencu selama beberapa hari, anak laki-lakinya yang masih kecil secara spontan menyatakan tidak ingin ikut karena “takut pada jihad”. Sebagai orang tua, mereka menyadari pentingnya dan menyatakan keterbukaan terhadap upaya untuk memperluas dan memperdalam kontak antara warga Kristen di Tentena dan warga Islam di kota Poso dan sekitarnya.

Kendala Pemulangan Pengungsi

Di Posunga, yang masih menampung sekitar 700-800 pengungsi dari Malei-Lage, penduduk menceritakan situasi di mana mereka merasa terjebak antara berbagai desakan yang sama kuat. Di satu sisi, mereka telah membangun rumah semi-permanen yang fungsional, sebuah gereja (merangkap SD), dan fasilitas-fasilitas lain. Mereka memiliki akses atas pekerjaan dan lahan pertanian di dalam dan sekitar Tentena, dan mereka masih mengunjungi rumah dan perkebunan coklat mereka di Malei-Lage setiap bulan, sering dua kali sebulan. Mereka sangat mencurigai kehadiran sekitar 20 orang mantan Laskar Jihad di Malei Tojo, desa di sebelah kampung halaman mereka. Insiden-insiden terakhir di desa mereka dan sekitarnya telah menambah ketakutan bahwa situasi keamanan belum sepenuhnya stabil. Mereka telah menjadi lebih sinis terhadap itikad dan kemampuan pemerintah akibat eksploitasi oleh penguasa setempat. Termasuk penggelapan yang terang-terangan dilakukan atas sejumlah besar dari bantuan untuk penghidupan yang ditujukan untuk keluarga-keluarga pengungsi (JADUP, atau jaminan hidup) dan untuk membangun kembali rumah tinggal sementara (RTS). Perkembangan ini telah membuat pengungsi yang tersisa di Posunga sangat tidak ingin kembali ke Malei-Lage.

Disisi lain, pengungsi melaporkan bahwa setiap mereka berkunjung ke Malei-Lage, hubungan dengan tetangga mereka yang beragama Islam benar-benar bersahabat dan tanpa dendam. Kelompok gabungan Islam-Kristen pergi ke perkebunan coklat bersama. BPD secara sengaja mengikutsertakan anggota campuran, mencakup pengungsi Islam maupun Kristen yang telah kembali. Meskipun belum sepenuhnya membaik kembali, kelompok-kelompok seperti kelompok tani dan organisasi perempuan seperti PKK atau kelompok arisan dipandang secara positif sebagai mekanisme yang dapat mempererat ikatan dalam komunitas. Bentuk lain dari kerjasama dalam desa menunjukkan potensi yang serupa, seperti partisipasi bersama dalam ronda dan kegiatan seperti olahraga, menjahit, atau kelompok menyanyi. Salah satu dari dua SD di desa tersebut, SD-2, telah berfungsi kembali dengan siswa dan tim pengajar campuran. Namun pada akhirnya, sebagian besar pengungsi ini percaya mereka akan kembali ke Malei-Lage, walaupun mungkin hanya setelah masa pemilu berlalu dengan damai.

Pengungsi yang tinggal di Later menunjukkan pandangan yang lebih meragukan mengenai kemungkinan untuk kembali. Pengungsi dari Bategencu, desa yang sebagian besar Kristen sebelum konflik, menceritakan rasa frustrasi mereka saat kembali ke desa mereka pada dua kali kesempatan hanya untuk mendapati rumah mereka terbakar lagi untuk ketiga kalinya. Mereka masih merasa sangat tidak yakin akan kemampuan pasukan keamanan untuk melindungi mereka, khususnya di desa Kristen seperti Bategencu, yang bersebelahan dengan daerah Muslim tapi terletak terlalu jauh dari pos Brimob atau TNI untuk memungkinkan respon yang tepat waktu jika terjadi insiden. Tambahan lagi, sejumlah besar pengungsi ini telah bergabung untuk membeli tanah di Kajauwa, Tentena, di mana mereka berencana untuk menetap secara permanen. Banyak juga yang mendapati bahwa mencari pekerjaan tambahan di Tentena lebih mudah ketimbang di kecamatan Lage, dan mereka akan terus memanen coklat dan hasil bumi lainnya dari kampung halaman mereka, jika situasi keamanan memungkinkan.

Secara umum, pengungsi-pengungsi ini sepertinya menerima homogenitas agama di lingkungan anak didiknya sebagai resiko akibat tinggal di Tentena, yang meskipun tidak diinginkan tetapi masih dapat ditanggung. Mereka menyatakan bahwa anak-anak sangat banyak menyerap rasa curiga dan ketakutan berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir. Seorang guru melaporkan bahwa dalam kegiatan sekolah minggu, anak-anak cenderung membuat gambar rumah mereka yang terbakar atau senjata-senjata yang digunakan. Seorang petani menceritakan bahwa saat ia mengatakan akan berkunjung ke

Kecamatan Pendolo – Pamona Selatan

Kota Pendolo adalah pusat kecamatan Pamona Selatan, sekitar 40 kilometer di selatan Tentena, dengan populasi sekitar 25.000 jiwa. Kira-kira 70 persen beragama Kristen, umumnya Pamona tapi juga suku Manadan, sementara 30 persen sisanya sebagian besar Islam, yaitu Bugis dari Sulawesi Selatan tapi juga suku lain dari Jawa, Lombok, dan Gorontalo. Pendolo menunjukkan ketahanan dan kohesi sosial yang kuat antara batas-batas agama dan suku, tapi masih terdapat beberapa perpecahan yang dapat diatasi melalui ikatan

kelompok dan kerjasama antar komunitas yang lebih kuat.

Sejak konflik terjadi, orang Islam sebagian besar kembali ke ibukota kecamatan, yaitu Pandajaya, walaupun sedikit yang telah kembali menempati rumah-rumah mereka sebelumnya di desa-desa terpencil atau Pendolo. Responden melaporkan bahwa hubungan sehari-hari antara berbagai kelompok sangat positif dan sebagian besar telah kembali normal. Kebalikan dengan daerah-daerah lain, sama sekali tidak ada rasa tidak aman, dan masyarakat bebas bergerak, termasuk larut malam. Kegiatan pasar telah sebagian besar kembali beroperasi, meski tidak seintensif sebelumnya. Pedagang Muslim berjualan di Pendolo pada hari-hari pasar dan pembeli Kristiani telah kembali berbelanja di pasar Pandajaya. Sekolah-sekolah negeri telah kembali membaur walaupun mungkin tidak seluas sebelumnya. Juga dilakukan upaya untuk sengaja mengikutsertakan perwakilan minoritas di pemerintahan setempat. Contohnya, Badan Perwakilan Desa (BPD) di Meko, sebuah desa Kristen, memiliki anggota Islam dan Hindu Bali.

Menurut informan setempat, ada sejumlah hubungan antar kelompok yang berpotensi untuk mempererat ikatan antarkomunitas namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya, PKK, kelompok arisan perempuan, dan kelompok tani, belum kembali beroperasi sepenuhnya atau terbatas dalam desa-desa atau dusun-dusun tertentu. Akan tetapi, sejumlah struktur dan hubungan ini mungkin cocok untuk ikatan seperti itu. Satu-satunya pengecualian utama dalam kurangnya ikatan kelompok ini adalah adanya Forum Komunikasi Pemuda Pamona Selatan yang baru dibentuk, yang menggabungkan kaum Islam maupun Kristen. Didirikan pada bulan Oktober 2002 melalui usaha sejumlah profesional muda, termasuk salah satu peserta Malino (Jhonli Pasangka), Forum Komunikasi tersebut tampaknya murni inisiatif masyarakat akar rumput. Forum ini memiliki 40 anggota inti dan perwakilan daerah di masing-masing dari 23 desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain rapat gabungan, termasuk acara pendiriannya, yang menghasilkan 10 pokok "kesepakatan" lokal. Walaupun oleh petugas Kabupaten Poso dipandang sebagai bentuk

FKAUB lokal, Forum Komunikasi tersebut belum menerima pendanaan pemerintah.

Kecamatan Morowali – Lembo

Beteleme, terletak 130 kilometer di sebelah tenggara Tentena di kecamatan Lembe. Merupakan pusat perdagangan yang sibuk di sepanjang jalan yang menghubungkan Poso dan Makasar dengan kota-kota yang agak besar, Kolonedale dan Bungku, kota-kota yang saat ini terletak di wilayah Morowali, sebagai kabupaten baru yang didirikan pada tahun 2000. Dengan sekitar 5.000 penduduk, Beteleme merupakan pusat administratif Kecamatan Lembo (total penduduk 16.000 jiwa). Kira-kira 90 persen dari populasi kecamatan ini adalah suku asli Mori, yang beragama Kristen, dengan sisanya terdiri dari penganut Protestan dari Manado, Katolik dari Flores, Hindu Bali, dan pendatang Islam dari Jawa, Lombok, dan daerah-daerah lain di Sulawesi.

Beteleme sendiri secara umum terhindar dari dampak konflik di Poso. Walaupun begitu serangan pembakaran di bulan Oktober 2003 telah menimbulkan ketegangan. Kehidupan dikabarkan kembali "normal" dan kejadian tidak berkembang menjadi kerusushan yang meluas di hari berikutnya. Hal ini terutama karena ada tanggapan yang efektif dari kepolisian dan peran positif yang dijalankan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang membuahkan penyelesaian damai. Pejabat, tokoh agama, dan juga penduduk setempat menghargai kepolisian yang memberikan respon yang cepat dan efektif dalam melacak dan menahan para tersangka pelaku. Sementara pemimpin-pemimpin resmi maupun tidak resmi di Beteleme, sepertinya menjalankan peran publik yang penting dalam menegaskan kembali pentingnya kerjasama antar kelompok dan meyakinkan penduduk agar tidak terprovokasi untuk melakukan pembalasan tanpa pandang bulu terhadap kelompok-kelompok lain. Tindakan-tindakan ini berhasil menjaga ketenangan kota dan tokoh Islam Beteleme juga telah berulang kali menolak usaha-usaha golongan "garis keras" dari luar untuk menanamkan pijakan di kota tersebut.¹⁹

¹⁹ Upaya-upaya ini tidak 100 persen efektif, sebagaimana ditegaskan dengan insiden Oktober: keikutsertaan "kelompok Lombok" dalam serangan

Imam kota dan kepala pendeta secara berkala melakukan pertemuan bahkan sejak sebelum insiden, namun pejabat setempat dan tokoh-tokoh agama secara khusus dan terbuka melakukan perayaan bersama Idul Fitri dan Natal, khususnya setelah peristiwa Oktober.

Reaksi damai terhadap provokasi yang jelas disengaja menunjukkan tingkat solidaritas antar kelompok yang tinggi di Beteleme. Kegiatan saling membantu terjadi dari hari ke hari antar penduduk dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, para pemilik rumah makan asal Jawa, yang meninggalkan Tentena pada tahun 2000 setelah orang tuanya menetap di dekat Danau Poso pada tahun 1950-an, menyatakan bahwa tetangga Kristen mereka meminjamkan meja, kursi, peralatan masak, dan bahkan piring untuk memulai bisnis baru. Di tingkat non-formal antar individu, penduduk Beteleme kabarnya membuat “komitmen kilat” satu sama lain untuk bersama-sama menghadapi provokasi dari luar dalam semangat solidaritas. Kegiatan sekolah kebanyakan bercampur di SD, SMP, dan SMU negeri Beteleme, dan anak-anak laki-laki serta pemuda bebas bermain olahraga bersama. Anak-anak perempuan dan perempuan, sebaliknya, kurang memiliki kesempatan namun dapat berinteraksi secara tidak formal melalui kelompok menjahit dan kegiatan kesenian. Baru-baru ini setidaknya telah ada dua ajang yang melibatkan kelompok pemuda masjid dan gereja, serta pemuda dan orang dewasa dari semua kelompok bersosialisasi secara bebas dan menarik *dero* di pesta-pesta.

Meskipun pedagang kecil di pasar hampir seluruhnya Bugis, organisasi pedagang, Ikatan Keluarga Warga Pasar, secara terbuka berjanji untuk mempertahankan keharmonisan antar golongan. Lebih lanjut, pemilik toko dan kios pasar yang terdiri dari campuran suku dan agama, hidup berdampingan dan hubungan antar mereka terlihat benar-benar positif. Termasuk juga kerjasama melalui kelompok arisan perempuan. Ada beragam ikatan kelompok lainnya yang membantu mempererat hubungan antar kelompok. PGRI cabang setempat, PKK, serta Dharma Wanita setempat, disebutkan beranggotakan baik

perempuan Kristiani maupun Muslim. Tergantung pada komposisi populasi desa, kelompok tani akan mengikutsertakan petani dari latar belakang suku dan agama yang berbeda. Ada koordinasi yang cukup besar antara berbagai organisasi serta lembaga adat dengan organisasi suku dan budaya yang ada.

didahului oleh kepulauan putra kepala desa ke Pa'arawu, setelah mendapatkan pelatihan agama yang ekstensif, dan mungkin kemiliteran, di Poso.

4. Membangun Perdamaian dan Memperkuat Kohesi Sosial

Bagian sebelumnya telah menggambarkan berbagai bentuk interaksi, kehidupan berasosiasi dan upaya-upaya rekonsiliasi berbasis masyarakat yang menyatukan penduduk dari beragam latar belakang suku dan agama di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk memudahkan, bagian ini menggunakan sejumlah kategori untuk membahas isu kohesi sosial sekaligus mempertimbangkan isu-isu yang memecah-belah masyarakat.^{20,21}

4.1 Pasar dan Hubungan Sosial

Beragam kegiatan ekonomi saat ini menyatukan umat Islam dan Kristen dari berbagai latar belakang suku di kedua wilayah kajian. Pasar lokal menjadi tempat yang penting untuk interaksi. Penjual dan pembeli dari semua kelompok agama dan suku telah kembali ke pasar yang dulunya dianggap “tidak aman” untuk didatangi oleh salah satu dari kelompok-kelompok masyarakat. Di Poso, para pedagang dari luar daerah telah kembali beroperasi secara normal, membeli hasil bumi seperti coklat dan vanili, dan menjual beras atau produk-produk konsumsi lainnya. Umat Islam dan Kristen di wilayah-wilayah tertentu mengatakan telah berangkat ke perkebunan coklat dalam kelompok kerja campuran yang terdiri dari 5-10 orang (biasanya laki-laki), yang disebut *mapalus*. Tetapi di tempat lain bentuk kerjasama demikian belum berjalan kembali. Selain itu, mekanisme kredit tak resmi atau pengumpulan dana seperti kelompok arisan masih nampak sebagai fungsi dari suatu jaringan yang sudah mapan, yang bercirikan suku, agama atau geografis. Di kota Labuha, Pulau Bacan, pemerintah kabupaten yang baru telah merelokasi pasar, yang sebelumnya terpencil di dalam daerah pemukiman umat Islam, dan membangun pasar baru yang terletak di antara pusat kegiatan utama umat Islam dan Kristen, untuk mendorong akses yang sejajar bagi kedua kelompok.

Secara umum, meskipun merupakan indikator pemulihan pascakonflik yang berguna, peluang yang diberikan oleh kegiatan berbasis pasar relatif terbatas untuk membangun kohesi antar kelompok yang lebih kokoh. Satu pengecualian adalah potensi peningkatan kerjasama melalui persatuan penjual seperti Ikatan Keluarga Warga Pasar. Hal ini berlaku bagi tempat-tempat yang penjualnya beragam, atau jika kebanyakan berasal dari satu kelompok (misalnya Bugis), yang dapat menjalin kemitraan dengan kelompok kepentingan lainnya atau dengan upaya pemulihan di tingkat komunitas. Contoh lain adalah usaha kecil atau menengah yang mencakup produsen atau mitra kerja dari beragam latar belakang yang keberhasilan bersamanya tergantung pada saling ketergantungan yang efektif. Penyusunan program yang sukses di bidang ini adalah suatu tantangan. Diperlukan analisis kasus per kasus dan kesempatan konkrit untuk memperluas keuntungan bagi para anggotanya, misalnya pembangunan pasar baru atau perbaikan pasar yang sudah ada tanpa adanya “pecundang” atau “pemenang” berdasarkan suku ataupun agama.

4.2 Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian

Di dua wilayah kajian, tim kajian telah menyaksikan banyak kemajuan dalam interaksi antar kelompok melalui kegiatan-kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian. Sebagian besar berlangsung secara spontan, tetapi ada juga upaya yang sengaja memanfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut, terutama pertandingan sepak bola, sebagai sarana untuk mendorong interaksi yang tidak formal. Skala upaya-upaya tersebut sangat terbatas, khususnya dilihat dari jumlah orang yang terlibat. Selain itu, peristiwa-peristiwa ini cenderung berfokus pada olahraga “laki-laki” seperti sepak bola tanpa memberikan perhatian yang memadai pada para gadis dan perempuan atau kegiatan yang dapat melibatkan laki-laki dan perempuan, seperti permainan “*team-building*” di alam bebas. Tersedianya tempat rekreasi seperti pantai, danau, air terjun, dan hutan menjadikan daerah ini ideal untuk kegiatan luar ruang semacam itu dan bahkan perkemahan untuk

²⁰ Katalog ini mengabaikan peranan Pokja, atau kelompok kerja untuk memperlancar proses Malino.

²¹ Lihat juga Kajian Tematis tentang Pemerintahan, Wanita dan Pembangunan perdamaian dan Pembangunan Ekonomi Lokal.

kelompok pemuda gabungan. Bidang lain yang belum tereksplorasi adalah musik secara umum dan menyanyi secara khusus – selama lagu-lagunya adalah apa yang disebut “nasionalis” dan tidak mencirikan golongan tertentu.

4.3 Sekolah dan Perguruan Tinggi

Sekolah-sekolah di daerah Poso menyajikan gambaran yang rumit tentang kerjasama antarkelompok. Di satu pihak, arus pengungsi dan pemisahan suku dan agama secara *de facto* seringkali membuat sekolah-sekolah menjadi lebih homogen komposisinya atau mendorong para orang tua dan muridnya sendiri untuk menghendaki sekolah berprofil agama. Di antara tempat-tempat yang didatangi dalam kajian ini, pemisahan suku dan agama nyata terlihat di sekolah-sekolah dasar di Masamba-Saatu, dan homogenitas sangat menonjol dalam konteks lain, seperti di Tentena, dan dalam skala yang lebih kecil di Pendolo-Pandajaya atau Beteleme. Hal yang sama terjadi di sebagian besar sekolah di tempat-tempat yang dikunjungi dalam kajian di Maluku Utara. Di pihak lain, integrasi sekolah memberikan kesempatan besar untuk memperbaharui interaksi dan kerjasama antarkelompok. Contoh yang paling positif yang ditemui oleh tim pengkaji di Poso adalah pembangunan SD Negeri campuran di Matakko. Upaya-upaya integrasi juga dapat meliputi upaya memperkuat ikatan perkumpulan, misalnya, di kalangan orang tua yang terlibat dalam BP3 sekolah atau di PGRI setempat. Dalam kasus tertentu, bantuan terarah dapat membantu integrasi (kembali) lembaga-lembaga pendidikan.

Di tingkat pendidikan tinggi, pemisahan komunitas merupakan suatu masalah. Mungkin yang paling menonjol adalah pendirian kampus kedua untuk Universitas di Poso, UNSIMAR, di Tentena untuk memenuhi kebutuhan para dosen dan mahasiswa di kalangan pengungsi Kristen. Saat ini sedang disusun rencana untuk penyatuan kembali UNSIMAR, suatu tanda kecenderungan yang positif khususnya dalam hubungan masyarakat secara umum. Di Maluku Utara, staf Universitas Khairun di Ternate dan Sekolah Tinggi Padmara di Tobelo menunjukkan minat untuk mengembangkan kegiatan bersama yang meliputi pertukaran dosen tamu, yang bisa menjadi cara yang

penting untuk mendorong interaksi sosial antara mahasiswa dan staf di lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini. Terlebih lagi, Universitas Khairun tengah memimpin pengembangan wacana publik mengenai pluralisme yang melibatkan cendekiawan dan aktivis LSM, di mana isu-isu kesukuan, agama dan identitas diperdebatkan. Universitas Khairun telah menerbitkan sekitar sepuluh buku tentang isu pluralisme dan multi kulturalisme.

4.4 Organisasi Pemuda dan Perempuan²²

Organisasi kepemudaan secara umum relatif tidak aktif atau lemah sebagai bidang kohesi sosial meskipun memiliki potensi yang besar. Di tempat-tempat yang didatangi di Poso, kelompok Karang Taruna sudah tidak aktif, demikian pula sebagian besar kelompok PKK (Program Kesejahteraan Keluarga). Komposisi resmi PKK, yang meliputi ibu-ibu pejabat setempat. Diduga bahwa dalam melakukan pekerjaan pelayanan sosialnya, peran kedua organisasi tersebut akan relatif mempermudah upaya untuk mengaktifkan serta lebih mengembangkan kerjasama antar kelompok. Tim ini menemukan beberapa contoh kegiatan gabungan kelompok pemuda dan perempuan yang diatur melalui mesjid dan gereja, yang menunjukkan bahwa hal ini bisa ditingkatkan. Arisan, sebuah organisasi untuk mengatur dana berputar yang telah disebutkan di atas, cenderung terbatas pada kelompok tempat tinggal dan, atau suku-agama tertentu dikarenakan jaringan tetangga atau pertemanan.

Seperti kaum perempuan, pemuda tidak terlibat di dalam proses rekonsiliasi di Maluku Utara.²³ Kajian ini menemukan bahwa pemuda memiliki peranan besar dalam mempengaruhi ketegangan publik dan dinamika konflik di Maluku Utara. Banyak pemuda terlibat dalam konflik, memainkan berbagai macam peran mulai dari pelaku kekerasan hingga sebagai pendukung logistik maupun moral konflik

²² Bagian ini tidak menyoroti peran wanita dalam kohesi sosial – untuk analisis yang lebih mendalam, lihat kajian tematis tentang Perempuan dan Pembangunan Perdamaian.

²³ Untuk rincian lebih lanjut tentang pemuda di Maluku Utara, lihat Yulianti Umrah (2004) Pemuda di Maluku Utara Pascakonflik. Laporan yang tidak dipublikasi.

yang terjadi. Ketika situasi mulai tak terkendali di akhir tahun 1999, serangkaian faktor memotivasi para pemuda untuk terlibat dalam konflik, termasuk diantaranya rendahnya latar belakang pendidikan, kurangnya informasi positif dan berimbang, dan tekanan untuk bergabung dalam peperangan dari masyarakat dengan budaya paternalistik yang kuat. Konflik memberikan kesempatan bagi pemuda untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi anak-anak. Dalam situasi emosional yang tidak stabil di mana solidaritas kelompok dan kejantanan diterjemahkan menjadi kekerasan. Anak muda tetap rentan untuk dimanfaatkan lagi oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk menimbulkan konflik, dan ada rasa tidak percaya yang besar pada para pemuda terhadap para orang tua di Maluku Utara. Hal ini tidak didukung oleh sifat paternalistik pemerintah dan lembaga lain yang biasanya tidak memberikan perhatian serius kepada anak muda.

Organisasi-organisasi pemuda (KNPI, Karang Taruna) sebagian besar dibentuk oleh elit pemerintah lokal dan nasional, seringkali memiliki tujuan-tujuan politik ketimbang sosial sehingga tidak terlalu memiliki kegiatan berbasis masyarakat kecuali pada waktu-waktu perayaan nasional. Organisasi-organisasi perempuan seperti PKK dan Posyandu, meski juga dibentuk oleh pemerintah, mempunyai

kegiatan yang lebih teratur. Organisasi-organisasi pelajar oleh sebagian besar responden yang diwawancarai diyakini tidak memberikan keuntungan bagi para pelajar kecuali mengurangi waktu belajar mereka. Di Maluku Utara pascakonflik, kurangnya organisasi sejati yang mewakili dan memenuhi minat serta kebutuhan para pemuda telah membuat mereka merasa terabaikan dan lemah. Ditambah sempitnya kesempatan kerja dan rekreasi, hal ini menimbulkan bahaya laten. Di lain pihak, anak mudalah yang bertanggung jawab atas sejumlah inisiatif pemulihan dan rekonsiliasi non-formal pascakonflik, dan tim pengkaji menemukan sejumlah proses rekonsiliasi non-formal atas inisiatif lokal di tingkat desa. Misalnya, di desa Soakonora kecamatan Jailolo, sekelompok pemuda mengatur pembangunan sebuah lapangan olahraga dengan dukungan moral dari para pemimpin desa dan dukungan finansial dari penduduk desa. Menurut mereka, lapangan olahraga ini adalah media yang sangat penting untuk menumbuhkan kembali kohesi sosial karena warga akan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan bersama di tingkat desa.

Kaum muda memiliki potensi untuk menghasilkan gagasan segar untuk masa depan Maluku Utara dan Poso, apabila mereka diberi dukungan dan kesempatan untuk itu. Mereka

Pemuda di Maluku Utara: Dari Rekonsiliasi ke Olahraga Bermotor

Pemuda di Maluku Utara telah mengambil inisiatif menyegarkan kembali gerakan *Baku Dapa*, yang dimulai oleh TNI di Tobelo dan Galela di akhir tahun 2000 untuk mendorong rekonsiliasi melalui para pemimpin masyarakat, tokoh agama dan pemuda, tetapi kurang ditindaklanjuti setelah pertemuan pertama. Pemuda setempat mengambil inisiatif untuk membentuk tim rekonsiliasi yang terdiri dari tujuh orang dari Tobelo dan Galela untuk membahas sejauh mana semangat gerakan *Baku Dapa* dapat dibawa ke tempat umum seperti pasar dan jalan. Sebagai hasil upaya ini, gerakan *Baku Dapa* dilaksanakan oleh para pemuda yang menggemari olahraga seperti *motocross* dan sepak bola serta pertunjukan kesenian antar lingkungan.

Olahraga bermotor, khususnya, telah memberikan wadah bagi para pemuda dari latar belakang yang berbeda-beda untuk berkumpul. Dalam situasi pasca konflik yang sulit ini, banyak laki-laki muda sekarang bekerja sebagai pengemudi ojek dan betor (becak motor) di ibukota-ibukota kabupaten seperti Tobelo, Jailolo, Labuha dan Ternate. Dengan bertambahnya jumlah pengemudi ojek dan betor, Kanwil Departemen Sosial Halmahera Utara meluncurkan program yang bertujuan membantu pemuda membuka bengkel layanan motor. Berangkat dari situ, lima orang pemuda yang membuka bengkel reparasi mempunyai gagasan membentuk tim balap motor tingkat kecamatan, yang akan saling mengundang dalam kompetisi balap. Kompetisi ini melibatkan banyak peserta dan penonton dari seluruh kabupaten, yang membantu memperbaiki hubungan masyarakat.

Tahun lalu, kompetisi diselenggarakan atas dukungan kepolisian setempat dan dealer motor di Tobelo. Acara tersebut sangat sukses dan tim-tim balap baru pun terbentuk sejak saat itu. Minat pada balap motor pada gilirannya telah memberikan dampak yang menguntungkan bagi perkembangan bengkel-bengkel reparasi motor melalui bertambahnya kebutuhan akan pengecatan, pemeliharaan, dan suku cadang. Terlebih lagi, keberadaan tim-tim balap dan bengkel-bengkel ini menggeser topik perbincangan dari konflik dan balas dendam ke motor dan kepemudaan. Bengkel-bengkel motor sekarang tidak hanya berfungsi sebagai tempat motor tetapi juga tempat para pemuda membicarakan beragam topik, mulai dari musik dan narkoba hingga kesempatan bisnis.

hendaknya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pemerintahan dan inisiatif perdamaian formal, menciptakan inisiatif mereka sendiri dan memiliki hak suara dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka membutuhkan akses atas informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sarana mengekspresikan kebutuhan mereka dalam masyarakat. Pengembangan kapasitas dan penyediaan layanan yang berfokus pada pemuda sangat diperlukan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan harga diri, nilai-nilai sosial dan sikap terhadap negara, yang akan memperkuat potensi pemuda untuk memainkan peranan positif dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik.

4.5 Kerjasama Berbasis Rumah Tangga dan Masyarakat

Kerjasama antar kelompok di tingkat rumah tangga atau masyarakat tampaknya merupakan fungsi dari dua faktor: struktur demografis tempat tersebut dan kerangka administrasi atau organisasi yang digunakan untuk mengelolanya. Ada beberapa contoh penting yang menunjukkan kerjasama antarkelompok dalam komunitas campuran di mana kerangka komunitas digunakan untuk mengadakan upaya-upaya pembersihan desa atau kerja bakti lainnya, ronda malam, atau gotong-royong yang bersifat lebih intensif, seperti membetulkan saluran irigasi dan jalan desa. Sejumlah daerah melaporkan keberhasilan upaya-upaya CWS dalam mengkoordinir kegiatan “makanan-untuk-perdamaian” berbasis masyarakat, membantu mengatasi efek terpecah-belah akibat konflik dan/atau pengungsian. Daerah lain melaporkan ronda atau gotong royong yang lebih eksklusif, jika misalnya, perbatasan administratif antara wilayah Muslim dan Kristiani yang bersebelahan dimanfaatkan untuk mengadakan upaya-upaya tertentu. Ini juga berlaku jika mesjid dan gereja dalam satu wilayah mengadakan kegiatan yang paralel tapi terpisah. Serupa dengan itu, kelompok tani dan nelayan, yang terdiri dari para petani dan nelayan, hanya efektif dalam membangun kerjasama antarkelompok jika memiliki komposisi yang terintegrasi. Contoh-contoh yang ditemukan selama kajian ini tidak sama dalam hal ini, tetapi mencakup pengalaman

positif dari kelompok-kelompok terintegrasi di Tambarana dan Matako.

Kaum perempuan seringkali terlihat memulai interaksi dan kerjasama berbasis komunitas. Di Maluku Utara, kaum perempuanlah yang pertama kali menyeberangi ‘garis aman’ antara kedua komunitas untuk mendapatkan bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula. Para perempuan pedagang di pasar, yang dikenal dengan sebutan *dibo-dibo*, mengikuti inisiatif penyeberangan antara dua komunitas ini. Para perempuan ini bertemu dengan perempuan pedagang lainnya di pasar dan berhasil meruntuhkan perbedaan identitas agama dan suku.

Banyak LSM di Maluku Utara menyelenggarakan program berbasis masyarakat, meski kebanyakan berpusat di kota Ternate dan Tobelo. Secara umum, pandangan masyarakat atas LSM bermacam-macam. LSM lokal secara tradisional bertindak terbatas hanya sebagai mitra pelaksana dari organisasi internasional, dan beberapa pihak melihat LSM lokal hanya berminat terutama untuk mendapatkan saluran dana dari organisasi internasional maupun nasional. Popularitas LSM di antara penduduk desa relatif rendah karena terbatasnya ketrampilan, pengalaman dan kapasitas staf LSM. Aspek positifnya adalah bahwa beberapa LSM mempunyai pengalaman mengorganisasi masyarakat secara baik. Satu batasan yang signifikan dalam LSM lokal adalah bahwa sebagian besar, jika tidak semuanya, cenderung hanya terdiri dari satu kelompok agama atau suku tertentu.

Mengintegrasikan kelompok tani dan nelayan mungkin sesuatu yang sulit dilakukan, jika tidak bisa dibidang tidak efektif. Yang justru bisa dilakukan adalah kerjasama penghubung melalui proyek-proyek prasarana kecil sampai menengah, yang bagaimanapun akan menguntungkan sebagian besar, jika tidak semua, penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini dapat meliputi rehabilitasi tempat-tempat rekreasi lokal dan/atau pembangunan (kembali) atau perbaikan sarana sanitasi, sistem pengairan, dermaga setempat, dan sejenisnya. Proyek-proyek tersebut juga berfungsi sebagai penghubung ke Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pedesaan ADB atau proyek Bank Dunia

melalui Program Pembangunan Kecamatan dan Bantuan untuk Program Pemulihan Ekonomi.

4.6 Kelompok Pekerja atau Organisasi Profesi

Di samping kelompok tani dan nelayan di tingkat pedesaan atau Ikatan Keluarga Warga Pasar di pasar-pasar, sangat sedikit organisasi pekerja atau profesi lain yang mengumpulkan kembali warga dari berbagai latar belakang suku dan agama. Ini disebabkan sifat ekonomi yang sebagian besar berbasis pertanian dan/atau nelayan, yang mewakili lebih dari setengah lapangan kerja di Poso dan Maluku Utara. Perdagangan, transportasi dan pertambangan secara gabungan mewakili seperempat lapangan kerja di provinsi tersebut. Tidak jelas bagaimana sektor bisnis swasta ini, terutama perusahaan-perusahaan eskplorasi sumber daya alam termasuk pertambangan dan industri kayu, mengelola dan memajukan kohesi sosial di antara karyawannya, dan hal ini bisa dikaji di kemudian hari. Di antara kaum elit non-agama, hanya persatuan guru (PGRI) yang dianggap sebagai satu contoh organisasi profesi yang lebih menjangkau semua pihak. Selain itu, akan layak juga dilakukan penilaian akan tingkat jangkauan dalam sektor pemerintahan dan organisasi lain, misalnya organisasi pekerja kesehatan (dokter, bidan dan juru rawat).

4.7 Tokoh Masyarakat, Tradisi dan Kerjasama Antar umat Beragama

Hubungan rutin dan kerjasama lokal antara para ulama Muslim dan pastur Protestan (dan PHD Hindu serta pendeta Katolik, jika ada) dilaporkan terjadi di hampir setiap lingkungan dengan komposisi campuran atau yang berdekatan dengan penduduk agama lain. Yang lebih sederhana adalah interaksi yang lebih sistematis antara kelompok gereja dan mesjid, misalnya, yang melibatkan kaum perempuan untuk membuat kue atau menjahit bersama atau para pemuda mengadakan kegiatan bersama. Di kalangan elit yang lebih terpelajar, pendeta Protestan terorganisasi dengan baik dan berbaur sukunya. Al-Khairat mungkin memiliki jaringan ulama Muslim yang paling maju di daerah Poso. Apabila jaringan-jaringan keagamaan bekerjasama secara paralel, mereka bisa menjadi alat yang

sangat kuat untuk rekonsiliasi karena secara luas tokoh agama masih dihormati. Ini bisa diperluas dengan melibatkan para tokoh Katolik dan Hindu.

Di Maluku Utara, para pemuka agama dan adat adalah satu-satunya kelompok masyarakat yang dipercaya oleh semua komunitas di tingkat akar rumput sehingga mereka benar-benar memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang. Meskipun pemuka agama dan adat telah mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan serangan, beberapa pemuka masyarakat terlibat dalam memobilisasi warga untuk berperang selama masa konflik. Struktur tradisi dan adat kembali muncul dengan kuat di Maluku Utara, terutama di Ternate, Jailolo dan Sahu, wilayah Kesultanan tradisional. Penduduk di kecamatan Jailolo yakin bahwa mekanisme adat, jika dipergunakan dengan efektif, dapat mencegah timbulnya konflik di tahun 1999-2000. Di Sahu, para pemuka agama dan adat sangat aktif menyebarkan gagasan 'satu keluarga Sahu', dan terlibat dalam upaya-upaya rekonsiliasi non-formal dengan mengunjungi keluarga-keluarga dan mendengarkan persoalan sehari-hari mereka.

Di Tobelo dan Galela, masyarakat telah mulai memikirkan peranan adat (struktur para tetua tradisional) sebagai penghubung dan fungsinya untuk mengurangi ketegangan dan membangun kohesi sosial. Para pemimpin tingkat desa berharap bahwa adat dapat dipakai sebagai mekanisme untuk menyatukan warga dan memecahkan persoalan di dalam dan di antara masyarakat di masa depan. Permasalahan dalam menghidupkan kembali adat di Tobelo dan Galela adalah tidak adanya lembaga, kepemimpinan ataupun struktur adat yang jelas. Sebaliknya, sistem adat yang baru dihidupkan kembali di Halmahera Barat memiliki tingkat organisasi yang mengesankan dan seringkali dengan bangunan adat baru untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang terletak di pusat desa.

Akan tetapi, mekanisme adat hendaknya tidak dianggap sebagai obat mujarab untuk membangun kohesi sosial. Di masa lalu, banyak terjadi kasus di daerah Kao-Malifut di mana sengketa tanah antar pihak dibawa ke Sultan Ternate dan keputusan diambil tanpa berkonsultasi dengan masyarakat. Hukum adat tidak tertulis, hanya diketahui oleh para tetua

(laki-laki) dan tidak terlalu dihargai oleh generasi yang lebih muda. Cenderung sebagai jalan konservatif untuk mengatasi masalah pribadi ketimbang masalah sosial, dan berfungsi karena karisma yang dimiliki dan pengambilan keputusan oleh si pemimpin itu sendiri, sementara masalah sosial membutuhkan partisipasi luas dalam pengambilan keputusan untuk solusi yang berkelanjutan. Para tokoh adat, dan dengan demikian pembuat keputusan, cenderung hanya dari kaum laki-laki, sehingga mengabaikan suara dan aspirasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. Desakan-desakan untuk memperbaharui lembaga dan mekanisme adat untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial perlu diimbangi dengan pertimbangan kesetaraan gender.

Jelas bahwa para tokoh agama dan adat memegang posisi yang unik sehingga mereka dapat menggunakan posisi dan ketenaran moral mereka untuk mendorong saling pengertian dan kehidupan bersama dalam lingkungan mereka. Para tokoh agama adalah batu penjurur tatanan sosial di sebagian besar, jika tidak semua masyarakat, dan organisasi-organisasi keagamaan mendapatkan kepercayaan yang paling besar di tingkat masyarakat. Walaupun inisiatif lokal yang dibuat oleh para pemuka masyarakat dan organisasinya merupakan suatu awal yang menjanjikan dalam meningkatkan interaksi antar lingkungan, mereka masih kekurangan dana dan dukungan pemerintah serta kapasitas teknis untuk benar-benar memberikan dampak yang luas di tingkat masyarakat.

4.8 Forum Rekonsiliasi Lokal

Di Poso dan Maluku Utara, telah terbentuk forum-forum lokal untuk mendukung komunikasi dan koordinasi efektif atas isu-isu yang berkaitan dengan rekonsiliasi dan pembangunan selanjutnya di tingkat kabupaten, kecamatan atau desa tertentu.²⁴ Contohnya antara lain KNPI cabang Poso (tingkat kabupaten), organisasi pemuda nasional yang terkait dengan pemerintah, telah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berskala besar yang mencakup umat Kristiani

²⁴ Ini di luar sistem Pokja yang disponsori pemerintah dan Pokja-RKP nonpemerintah, atau Kelompok Kerja untuk Resolusi Konflik di Poso.

dan Islam di seluruh wilayah. Ikatan Kekeluargaan Siwagi Lemba Toposo (tingkat kabupaten) yang baru terbentuk, yang baru-baru ini menyelenggarakan pertemuan besar di Tentena untuk sekitar 800 “penduduk asli Poso” dari berbagai kelompok sub suku Pamona, termasuk umat Muslim maupun Kristiani.²⁵ Forum Komunikasi Pemuda Pamona Selatan, suatu inisiatif independen yang dimulai tahun 2002, terdiri dari para profesional muda dan pemuka masyarakat Kristiani dan Muslim. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (masing-masing desa atau kota), suatu mekanisme semi-resmi yang pertama dibentuk sebagai kelompok tanggapan krisis antar suku di Tambarana, Poso Pesisir, yang sejak saat itu berkembang dari atas-ke-bawah di lingkungan-lingkungan lain di seluruh daerah tersebut.

Tim Rekonsiliasi 30 Kabupaten Jailolo

Tim Rekonsiliasi 30 kabupaten Jailolo dibentuk oleh TNI dan pemerintah lokal untuk memudahkan dialog dan proses rekonsiliasi dan pengembalian pengungsi di kabupaten Jailolo. Pemerintah lokal pada saat itu mendukung tim rekonsiliasi ini dengan memberikan dana dan biaya transportasi, sementara TNI mendukung prosesnya dengan mengundang para pemuka adat dan agama untuk bertemu dan duduk bersama membentuk tim. Para pemuka masyarakat dan agama itu sendiri kemudian memilih para anggota tim. Mereka mendapatkan lima belas pemimpin di masing-masing kelompok (Islam dan Kristen) yang terdiri dari pemimpin adat, agama, masyarakat dan pemuda. Satu kelemahannya adalah kaum perempuan tidak terwakili dan semua anggota Tim 30 ini adalah laki-laki.

Beberapa tahun setelah konflik, meskipun tim-tim ini masih memperhatikan rekonsiliasi yang dipertahankan dan reintegrasi sosial yang efektif untuk pengungsi yang kembali serta normalisasi hubungan antar kelompok, mereka kekurangan dukungan dari pemerintah.

Semua upaya tersebut sejauh ini sebagian besar berfungsi sebagai “pusat diskusi” antar kelompok atau anggota dari latar belakang yang berbeda-beda. Dalam kapasitas ini, terutama selama masa-masa tegang atau setelah Deklarasi Malino, inisiatif-inisiatif

²⁵ Para anggota Muslim di jaringan ini telah menyatu kembali di dalam Forum Kerukunan Keluarga Muslim Toposo, yang dibentuk pertama kali di tahun 2001 dan diresmikan pada bulan April 2003. Upaya ini berbeda dari Forum Silaturahmi Muslim Poso, yang mencakup umat Islam dari semua kelompok suku tetapi dikritik oleh beberapa pihak karena didominasi oleh Muslim “luar” (misal non-Poso).

Kelompok Kerja (Pokja) Malino di Sulawesi Tengah

Ada banyak pendapat mengenai manfaat proses Malino dan Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk untuk menciptakan rekonsiliasi di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Secara umum, proses ini bermanfaat dan perlu dilanjutkan, terutama untuk mendorong interaksi, hubungan dan kepercayaan antar desa yang lebih besar. Juga dicatat bahwa Pokja telah berhasil mengumpulkan kembali beberapa warga terkemuka selain fungsionaris pemerintahan. Pokja juga dapat memainkan peranan pengawasan yang efektif atas bantuan resmi dari pemerintah. Kritik utama terhadap peranan Pokja adalah komposisinya, yang tampaknya tumpang tindih dan bersaing dengan struktur pemerintahan yang ada. Menurut pandangan ini, apa yang dibutuhkan bukanlah sistem Pokja yang paralel dan membingungkan tetapi kepemimpinan yang efektif dari bupati hingga ke kepala desa. Selain itu, pembentukan Pokja, di bawah Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang), dianggap telah menciptakan keraguan akan kelanjutan manfaat Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) yang berada di bawah Kantor Urusan Agama. Terhadap kritik sebelumnya, dimana jumlah anggota Pokja kabupaten dianggap terlalu besar, telah ditanggapi dengan mengurangi jumlah anggotanya menjadi 50 orang, meskipun pendekatannya masih bermasalah karena terlalu birokratis. Ada kebutuhan lebih besar terhadap kejelasan tentang prosedur pendanaan dan transparansi keuangan, terutama karena para komentator banyak yang mengatakan bahwa Pokja-Pokja itu menghabiskan anggaran Rp 4,5 miliar di tahun 2002. Pembukaan publik dan pelaporan tentang prosedur dan pembelanjaan keuangan Pokja dapat membantu mengatasi persepsi negatif tentang penyalahgunaan dan penyalahgunaan dana.

tersebut memainkan peranan penting dalam membangun kembali atau memperbaiki komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman dan polarisasi. Perlu diperhatikan apakah kegiatan-kegiatan terbaru dan paling independen, yaitu Ikatan Kekeluargaan Siwagi Lemba Poso dan Forum Komunikasi Pemuda Pamona Selatan, akan mengembangkan rencana dan kapasitas yang dapat diandalkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih konkrit seperti membantu integrasi kembali para pengungsi yang telah pulang atau menyediakan ketrampilan dan layanan bagi masyarakat.

Di Maluku Utara, tim-tim rekonsiliasi dibentuk di tingkat kecamatan di banyak wilayah, misalnya Tim 30 di Jailolo, Tim 25 di Sahu dan tim rekonsiliasi Galela-Tobelo. Semua tim tersebut memainkan peran fasilitasi yang penting dalam proses pemulangan pengungsi dan rekonsiliasi antara desa-desa yang sebelumnya bertentangan. Mereka menggunakan penyebaran informasi dan pertemuan para kepala dan warga desa untuk mendorong pemulihan dan mengurangi ketegangan. Tim-tim ini cukup efektif di hampir setiap daerah di Maluku Utara karena mereka bekerja dalam ikatan tradisi budaya masyarakat yang cukup kuat. Secara umum, warga setempat menghormati prosesnya dan bersedia mendengarkan para tetua dan orang-orang yang memegang jabatan khusus dalam masyarakat (tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda).

Untuk tujuan membangun perdamaian jangka panjang, tim-tim rekonsiliasi ini dapat didorong supaya berkembang menjadi intitusi dan mekanisme baru di tingkat masyarakat

yang menggabungkan partisipasi demokratis dengan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Kelebihan tim ini adalah para anggotanya telah dikenal dan mendapat kepercayaan dalam proses rekonsiliasi, dan hampir semua anggotanya dihormati semua kalangan. Mereka juga menunjukkan itikad baik dan energi yang besar untuk terus mendukung masyarakat serta memecahkan permasalahan yang masih tertinggal, termasuk yang berkaitan dengan kohesi sosial. Kelemahannya adalah mereka tidak mempunyai cukup dana (kecuali sumbangan dari masyarakat) juga dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurangnya peran serta kaum perempuan dan pemuda. Perlu dicatat bahwa membina kohesi sosial bukanlah bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Provinsi di tahun 2005, sehingga sepertinya tidak mungkin akan ada pendanaan yang memadai di masa yang akan datang.²⁶ Masyarakat memerlukan suatu mekanisme untuk menjalin komunikasi dan kerjasama lintas kelompok-kelompok suku dan agama dan, saat ini, hanya ada sedikit kesempatan untuk itu. Mekanisme semacam itu dapat menjadi titik awal yang baik untuk pengembangan kelompok peringatan dini dan pemecahan masalah di tingkat masyarakat yang dapat bertindak untuk mencegah konflik, atau setidaknya mencegah penyebaran atau peningkatan konflik dan kekerasan.

4.9 Struktur dan Proses Pemerintahan

Pemerintahan biasanya dipahami sebagai suatu hubungan “vertikal” antara yang diperintah dan yang memerintah, dan

²⁶ Hasil dari Konsultasi Perencanaan Pembangunan Provinsi 2005 untuk Maluku Utara.

bukannya sebuah dimensi “horisontal” dari kohesi sosial. Bagaimanapun, pemerintah daerah dan pengambilan keputusan telah memberikan dampak yang signifikan atas kerjasama antar kelompok, baik positif maupun negatif. Pengambilan keputusan di tingkat lokal mempengaruhi persepsi tentang keadilan (apakah “pemenang” atau “pecundang” yang dihasilkan dari praktek atau keputusan tertentu), dan pemerintahan yang dikenal sebagai partisan atau korup dapat menimbulkan keluhan-keluhan yang memicu konflik. Keluhan yang kedua itulah yang ditekankan oleh para pengungsi (baik Islam maupun Kristen) dengan laporan penggelapan dana pengungsi.²⁷ Akan tetapi ada juga contoh positif, terutama di tingkat pedesaan, di mana kadar kepercayaan dan apresiasi terhadap peran dan komitmen pimpinan desa biasanya lebih tinggi. Contohnya, masyarakat memberikan penghargaan terhadap kepala desa yang bersikap tidak memihak dalam upaya-upayanya. Juga penghargaan terhadap dewan desa (BPD, atau Badan Perwakilan Desa) dalam merangkul keanekaragaman sosial di lingkungan campuran. Hal ini dianggap oleh warga sebagai kontribusi besar bagi kohesi sosial dan perdamaian. Lebih lanjut, beberapa pengambilan keputusan lokal, atas kesadaran sendiri, telah bersikap ‘peka terhadap konflik’ dalam upaya mengimbangi ketidakseimbangan suku dan agama yang dapat memicu pemecahan antar kelompok.

Kebalikan dari pemerintahan desa, masyarakat di Maluku Utara memandang pemerintah provinsi lamban atau tidak aktif dalam merespon kebutuhan rakyat. Biasanya pemerintah merencanakan dan melakukan program-program tanpa berkonsultasi secara memadai dengan masyarakat. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme diyakini telah meluas sehingga para pejabat pemerintahan sudah sangat tidak dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa para pejabat mencapai kedudukan mereka dengan memberikan uang suap. Anggapan yang sama juga berlaku secara bagi para pejabat di tingkat kabupaten, meskipun lahannya jauh lebih terbatas. Sebagai buktinya mereka menunjuk para pejabat kabupaten, dari beberapa

kabupaten, yang lebih memilih bertempat tinggal di ibukota provinsi, Ternate, daripada di ibukota kabupaten. Pada saat yang sama penduduk lokal merasa ada kompetisi yang sangat ketat antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, sebagai akibat kebijakan desentralisasi, khususnya untuk pengungsi dan pembangunan sosial.

Secara umum, meskipun bidang ini sulit ditangani, ada tiga aspek yang memerlukan pertimbangan khusus. *Pertama*, memperkuat upaya-upaya advokasi masyarakat, terutama jika bersifat antar kelompok, dapat memberikan kontribusi besar bagi pemerintahan yang baik dan kohesi sosial. *Kedua*, perencanaan pembangunan berdasarkan konflik (atau “berdasarkan perdamaian”) dapat membuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi keseluruhan daerah. Hal ini penting khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan lebih banyak uang dan keuntungan lain. Dalam kondisi ini resikonya menjadi lebih tinggi untuk terjadi korupsi atau (persepsi) adanya “pemenang” dan “pecundang” dari suku dan agama tertentu. *Ketiga*, adanya mekanisme tidak resmi untuk memobilisasi pelayananan masyarakat, yang dapat dipengaruhi untuk menghasilkan kerjasama antar kelompok dalam konteks upaya pembangunan masyarakat. PKK adalah contoh utama dalam hal ini.

4.10 Struktur, Isu, dan Dinamika yang memecah-belah Masyarakat

Di wilayah Poso, tercatat ada lima faktor yang memecah-belah kelompok, yang secara umum juga berlaku pada situasi di Maluku Utara. Faktor-faktor tersebut adalah (i) ketidakamanan, (ii) pemisahan geografis dan jarak fisik, (iii) jaringan gereja atau masjid yang terpisah, (iv) organisasi suku dan budaya yang terpisah dan (v) perasaan tidak puas dan ketidakadilan. Donatur tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah faktor-faktor ini, tapi dalam beberapa kasus, penyusunan program tertentu dapat dikembangkan untuk mengimbangi, atau mengurangi, efek yang lebih memecah-belah.

Ketidak-amanan adalah sumber utama ketidakpastian dalam hubungan antar

²⁷ Lihat “*Pelicin Banyak Jadup Terbayarkan*” (“*Expeditors Paid a Lot of Jadup*”), *Poso Post*, 24-29 Februari 2004, p. 1.

kelompok yang ditemukan di sejumlah desa minoritas. Ketakutan ini, terutama bila dipicu oleh desas-desus yang tidak akurat, menghilangkan rasa percaya terhadap keefektifan angkatan bersenjata maupun itikad kelompok “lawan”. Pemisahan geografis dan jarak fisik yang ada melipatgandakan ketakutan ini dan sempitnya pandangan beberapa “daerah kantong” yang homogen menimbulkan tantangan yang sangat berarti untuk membangun (kembali) kohesi sosial yang lebih besar. Daerah-daerah kantong tersebut hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berhubungan dan berinteraksi secara berkesinambungan atau lebih mendalam, khususnya interaksi antara kelompok-kelompok suku dan agama yang berbeda-beda. Diharapkan melalui mekanisme seperti sekolah, organisasi lingkungan rumah tangga, dan layanan atau pembangunan masyarakat, interaksi akan lebih mudah dibangun. Jarak fisik yang nyata, misalnya, antara kota Poso dan Tentena atau antara desa-desa terpencil dan wilayah-wilayah perkotaan menjadi persoalan utama bagi Poso. Di Maluku Utara, banyak desa, terutama di bagian selatan provinsi, memiliki akses jalan raya yang sangat terbatas sehingga masyarakat menjadi sangat tergantung pada transportasi laut. Persoalan ini mengarah pada isolasi sosial dalam lingkungan yang homogen.

Suatu dinamika yang nyata dan patut dicatat adalah sistem arena paralel dimana para penduduk Poso beribadah, pemuda dan perempuan bergabung untuk berpartisipasi dalam kelompok-kelompok studi agama, serta melakukan kegiatan lainnya berdasarkan afiliasi masjid atau gereja. Meskipun kenyataan yang berbeda ini diperlukan, penyusunan program juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kontak antar kelompok melalui lembaga-lembaga agama ini. Baik di Poso maupun Maluku Utara tampak adanya minat yang nyata terhadap pengembangan dialog antar umat beragama. Dengan cara yang sama,

organisasi-organisasi suku dan budaya (contohnya, untuk para pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, Toraja, atau Manado) cenderung beroperasi dalam bidang paralel yang tidak selalu terjembatani secara sistematis.

Hal yang menarik adalah bagaimana mayoritas penduduk di daerah Poso dan Maluku Utara, apapun identitas suku dan agama mereka, tampak dengan tulus bersedia untuk maju bersama dalam semangat kerjasama dan rekonsiliasi. Hal ini difasilitasi oleh suatu keyakinan yang meluas, entah benar atau tidak, bahwa “orang luar”lah yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi dan/atau bahwa baik umat Muslim maupun Kristiani menderita akibat kekerasan itu, sehingga menjadikan dampak negatif konflik kurang lebih “setara” bagi semua penduduk. Meskipun, masih saja ada sumber keluhan tertentu atau perasaan ketidakadilan yang menonjol bagi sekelompok orang dengan identitas tertentu.

Akhir kata, kajian ini tidak melakukan pencatatan atas sengketa-sengketa tanah atau bidang-bidang tertentu. Banyak terjadi persaingan atau konflik besar antar kelompok mengenai akses atas hutan, tempat penangkapan ikan, lahan pertanian dan pasar. Namun, isu-isu ini jelas mengarah pada perselisihan dan penciptaan segregasi, dan perlu diawasi terus-menerus dan perlu dilakukan suatu analisis yang lebih mendalam serta menyeluruh. Ada kebutuhan akan pertukaran properti yang efektif –berikut mekanisme penanganannya – dalam kasus-kasus di mana pemilik asli tidak bermaksud kembali lagi ke tanah atau rumahnya yang sudah ditempati oleh pengungsi lain serta ingin menetap di atasnya.

5. Kesimpulan dan Saran – Kerangka Kerja untuk Dukungan

5.1 Tanggapan Pascakonflik untuk memperkuat Kohesi Sosial

Sebagai tujuan umum dalam pekerjaan kohesi sosial, agen pelaku perlu mempertimbangkan dua pendekatan: (1) bagaimana menjalin (atau mengembalikan) hubungan yang efektif dan (2) bagaimana membantu masyarakat mengatasi rasa tidak puas, ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Pendekatan pertama jauh lebih sesuai dengan perencanaan pembangunan dan konsep proyek pada umumnya, namun pendekatan yang kedua juga tidak kalah penting, meskipun menantang dan secara politis lebih sensitif. Dalam pendekatan yang pertama, yaitu menjalin hubungan untuk meningkatkan interaksi, ada kecenderungan untuk terfokus pada peningkatan jumlah peserta, atau penerima manfaat. Hal yang seringkali terlewatkan adalah kebutuhan untuk menyusun program tersebut sehingga dapat menjalin (kembali) hubungan antara para pelaku penting atau agen atau unsur masyarakat yang berpengaruh – dan tidak hanya jumlah penduduk keseluruhan. Selain itu, penyusunan program dapat menargetkan perubahan di tingkat individu atau pribadi. Tantangannya adalah memastikan bahwa perubahan juga terjadi di tingkat sosial politik pada saat yang bersamaan, yang tentunya lebih kompleks.²⁸ Lebih lanjut, penyusunan program kohesi sosial yang bertujuan mengubah sikap, dan pada akhirnya perilaku manusia, membutuhkan penyusunan program jangka panjang.

Secara umum, agen pelaku perlu lebih berhati-hati dalam memilih dan menggali prioritas dalam memperkuat kohesi sosial. Tidak hanya karena meningkatnya kejenuhan akan upaya-upaya rekonsiliasi yang bersifat dari atas ke bawah, tapi juga karena memperkuat kohesi sosial tidak berhubungan secara langsung dengan upaya pencegahan munculnya kekerasan baru. Kohesi sosial yang lebih kuat mungkin membantu menghentikan penyebaran kekerasan di beberapa daerah,

tetapi faktor lain, terutama peranan kepemimpinan pemerintahan dan angkatan bersenjata, dalam hal ini lebih menentukan. Pada akhirnya, terlalu banyak “uang gampang” yang dialirkan untuk upaya rekonsiliasi beresiko timbulnya terlalu banyak kegiatan-kegiatan bermutu rendah.

Dinamika di belakang konflik dan pola kohesi sosial berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, bahkan terkadang dari satu desa ke desa lain. Ini adalah tantangan penting dan membutuhkan pendekatan dengan pengambilan keputusan setempat berdasarkan pemahaman yang jelas atas konteks lokal. Kajian ini juga menunjukkan perlunya penanganan terhadap penyebab rasa tidak percaya terhadap pemerintah (struktural) dan juga hubungan antar golongan di antara desa-desa, dengan suku dan agama yang berbeda-beda, untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap hasutan dan konflik.

Cara kerja terbaik bagi organisasi eksternal adalah melalui kerjasama dengan mitra lokal untuk mendukung inisiatif kohesi sosial dan rekonsiliasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Penyusunan program dapat dimulai dengan analisis lokal mengenai sebab-sebab konflik, identifikasi kemampuan untuk membangun perdamaian, dan tindakan untuk mendukung perdamaian serta pembangunan. Membangun kohesi sosial membutuhkan kerjasama dengan mitra untuk mendukung kelompok dan pemerintah setempat, menjalin kerjasama serta kepercayaan antara berbagai golongan yang berbeda, dengan menggunakan keahlian membangun perdamaian di Indonesia. Penyebab ketegangan struktural perlu ditangani secara khusus. Hal ini mungkin dilakukan melalui reformasi kebijakan lokal dan proses pemberdayaan kelompok-kelompok lokal untuk mengidentifikasi permasalahan struktural yang berpotensi menyebabkan konflik, serta memperjuangkan perubahan.

²⁸ Lihat Mary B. Anderson dan Lara Olson, *“Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners,” Reflecting on Peace Practices Project*, Cambridge, MA: Collaborative for Development Action, Inc., 2002, pp. 55-56 dan p. 65 ff.

5.2 Rekomendasi Kerangka Kerja untuk Tindakan Terencana²⁹

Maluku Utara

Dukungan untuk kohesi sosial dapat dilakukan berdasarkan lokakarya PDA di tingkat provinsi, dengan mendukung analisis multi-stakeholderer konflik dan perdamaian pada tingkat yang lebih lokal (kabupaten/kecamatan), dimana potensi penyebab konflik dan kemampuan lokal untuk mengupayakan perdamaian diidentifikasi. Dari sini dilanjutkan pada identifikasi strategi dan kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang bisa membantu mencegah konflik kekerasan, memperkuat kohesi social, dan membangun perdamaian. Sebagaimana dikatakan oleh seseorang di Maluku Utara:

“Sangat penting untuk bekerja dengan situasi non fisik seperti mengatasi trauma, kecurigaan dan ketakutan yang tersembunyi, sama pentingnya dengan membangun kohesi sosial”.

Agen pelaku dari luar serta mitra-mitranya yang bertugas memperkuat kohesi sosial dan membangun perdamaian perlu mengikuti prinsip-prinsip dan praktek-praktek tertentu berikut ini:

- Bekerja dalam jangka panjang, bertujuan mempengaruhi hubungan antar kelompok dan memecahkan isu-isu yang menyebabkan ketegangan dan konflik.
- Menggunakan pendekatan komprehensif yang berfokus pada komunitas setempat dalam konflik, atau potensi konflik, sekaligus secara startegis melibatkan pemerintah mulai dari tingkat menengah sampai atas.
- Bekerja dalam kemitraan yang menekankan transfer ketrampilan dan meningkatkan kemampuan lembaga, organisasi, dan struktur masyarakat setempat demi membangun perdamaian.
- Bekerja melalui mitra lokal yang mewakili keanekaragaman suku dan agama setempat.
- Menanggapi penyebab konflik kekerasan termasuk isu-isu ‘vertikal’ seperti

pemerintahan, penyertaan, dan ketidaksetaraan serta hubungan ‘horisontal’ untuk membangun integrasi dan kohesi sosial.

- Melibatkan perempuan dan laki-laki, pemuda, serta kelompok-kelompok minoritas atau marjinal lainnya.
- Memerlukan analisis multi-stakeholder untuk mengidentifikasi sebab-sebab ketegangan, perbedaan dan kemampuan, serta pelaku-pelaku lokal untuk menjalin kerjasama dan perdamaian antar golongan.

Tujuan Program

Tujuan-tujuan berikut ini diusulkan sebagai sub-program untuk mendukung penguatan kohesi sosial:

- (1) Kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten, yang secara eksplisit berkaitan dengan kohesi social, dan yang tanggap terhadap kebutuhan lokal, mendukung kesetaraan, partisipasi, perwakilan yang adil, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Mengembangkan kemampuan kelompok-kelompok lokal untuk (a) menangani penyebab, dan potensi penyebab konflik (terutama di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lahan, pemerintahan yang buruk, hukum, keamanan dan ketertiban, akses yang setara atas layanan dan sumber daya pemerintah) dan (b) membangun kepercayaan dan hubungan antara kelompok-kelompok suku dan agama dengan mendorong komunikasi dan kerjasama untuk perdamaian dan pembangunan yang menentang prasangka dan mendukung toleransi serta asosiasi lintas tradisi dan perbedaan sosial.

Prioritas untuk Penyusunan Program

Meskipun tujuan-tujuan di atas akan mengarah pada identifikasi isu yang lebih luas di bidang-bidang prioritas untuk pencegahan konflik, ada dua isu yang patut mendapat prioritas utama. Kedua prioritas tematis tersebut adalah:

- **Pemuda** – (a) Meningkatkan partisipasi anak muda dalam kegiatan pemerintahan dan perdamaian, (b) melibatkan pemuda dari berbagai latar belakang suku dan agama dalam menciptakan lapangan kerja melalui pelatihan dan kerjasama dan (c) bekerja dengan kelompok-kelompok suku dan agama untuk mengembangkan toleransi, strategi anti

²⁹ Laporan ini berdasarkan dua penilaian yang dilakukan di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, dan saran-saran dari masing-masing penilaian diberikan secara terpisah, beberapa diantaranya mungkin berlaku untuk kedua provinsi.

diskriminasi dan tanpa kekerasan untuk mengatasi perbedaan dan permasalahan. Menumbuhkan kepercayaan antara pemuda dan orang dewasa adalah hal penting. Upaya-upaya pemulihan harus mengambil “pendekatan penyusunan program berdasarkan hak” dengan fokus pada kesadaran anak muda terhadap hak-hak dan kewajiban. Pemerintah perlu didukung melalui pembinaan kemampuan untuk memahami peranannya sebagai pengembalian tugas dan untuk mendukung pengembangan program dan layanan yang lebih baik untuk pemuda. Di tingkat masyarakat, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program rekonsiliasi perlu ditingkatkan.

- Pengungsi dan Kepulangan Pengungsi
– Untuk mendukung integrasi sosial setelah kepulangan pengungsi, dan membentuk mekanisme untuk komunikasi dan pemecahan masalah melalui kerjasama dan advokasi.

Tim pengkaji mengidentifikasi sejumlah tanggapan yang perlu segera diberikan:

- Dukungan untuk Kao-Malifut – Ketegangan yang terjadi saat ini di Kao-Malifut memerlukan suatu tim lokal yang bisa bekerja secara efektif untuk mengurangi ketegangan, prasangka, dan membangun apresiasi serta pengertian antara masyarakat Kao dan Malifut-Makian. Pendampingan teknis dapat dilakukan kepada tim yang terdiri dari para pemimpin kelas menengah.

- Dukungan untuk Penghidupan di Galela – Tobelo – Mendukung penghidupan termasuk akses ke pasar-pasar bagi para petani setempat untuk menjual hasil bumi mereka seperti kopra atau vanili. Para petani juga harus menambah jenis tanaman mereka sebagai dampak dari konflik atas pemasaran hasil-hasil pertanian. Dukungan semacam itu akan mendorong rasa percaya diri petani dan menciptakan perasaan ‘kembali pada kenormalan’ melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.

Kriteria untuk Proyek kohesi Sosial

Serangkaian kriteria untuk proyek kohesi sosial harus dikembangkan sehingga dapat dipergunakan untuk menilai dan memilih inisiatif. Usulan yang masuk ke organisasi internasional perlu diprioritaskan dimana mitra lokal juga dilibatkan (pemerintah, LSM atau kelompok masyarakat), dan ada rencana yang

jelas dalam hal transfer keahlian dan kemampuan kepada para mitra lokal. Tidak semua pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan tersedia di kalangan organisasi lokal dan internasional. Organisasi-organisasi perdamaian di wilayah Indonesia lainnya mungkin dapat diminta untuk menyumbangkan pengalaman dan keahlian mereka yang relevan. Kriteria untuk pemilihan proyek dapat mencakup beberapa hal berikut ini:

- Berdasarkan analisis multi-stakeholder atas penyebab dan potensi penyebab konflik.

- Mengidentifikasi peran organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya yang terlibat di bidang ini dan menampakkan pembentukan jaringan dan hubungan bilamana mungkin.

- Menetapkan bagaimana berbagai kelompok suku, agama, atau yang lainnya akan dikelompokkan atau diorganisasi di dalam suatu usulan bersama.

- Memanfaatkan dan melengkapi sumber daya dan kapasitas yang tersedia di tingkat pedesaan, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

- Memasukkan komponen pelatihan, dan jika diperlukan, dukungan untuk perubahan konflik dan keahlian advokasi dari penyedia pelatihan.

- Memiliki proses perencanaan dan evaluasi program yang berkelanjutan dan sistematis.

Lintas Sektoral Isu-isu Kohesi Sosial

Kohesi sosial merupakan persoalan lintas sektoral yang terkait dengan aspek-aspek nyata yang lain sehingga dapat diterapkan oleh para agen pelaku dari luar. Secara khusus, kajian ini telah menemukan tiga bidang penyusunan program yang dapat diterapkan untuk memperkuat kohesi sosial sebagai isu lintas sektoral. Ketiga bidang tersebut adalah (1) Pembangunan Ekonomi Lokal dan Lapangan Kerja, (2) Pemerintahan dan (3) Media.

1. Pembangunan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi adalah terbatas dan tidak menentu. Tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda ditemukan sebagai faktor penting, terutama di kota-kota seperti Tobelo dan Galela. Sementara kadar ketidakpastian

terhadap kehidupan mungkin tidak terlihat secara langsung di wilayah pedesaan. Persoalan ini memerlukan pengkajian lebih lanjut. Penyusunan program di sektor ekonomi berpotensi memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan keamanan manusia.

2. Pemerintahan

Pemerintahan yang baik merupakan kekuatan yang penting untuk kohesi sosial. Beberapa bidang utama meliputi keterwakilan dan partisipasi yang efektif oleh berbagai kelompok suku, kaum perempuan dan pemuda, mengembangkan tanggapan yang lebih efektif terhadap kebutuhan masyarakat, peraturan yang jelas, dan menegakkan kebijakan dan undang-undang yang ada (termasuk kebijakan eksplisit untuk mendukung kohesi sosial), serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif atas program-program pemerintah.

3. Media

Desas-desus adalah pemicu penting dalam konflik di Maluku Utara. Untuk itu perlu dibentuk mekanisme untuk menangani ancaman yang telah terbentuk antar desa, sebagai alat yang penting untuk mencegah peningkatan konflik. Laju informasi dan kesalahan informasi telah meningkat pesat dengan penggunaan telepon genggam. Kemampuan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan desas-desus sebagai cara untuk mengembangkan konflik perlu dibatasi dengan menjalin komunikasi antar golongan dan mekanisme tanggapan dini.

Sulawesi Tengah

Tim pengkaji di Sulawesi Tengah mengajukan tiga rangkaian kunci rekomendasi untuk memperkuat kohesi sosial. Ketiga rangkaian rekomendasi tersebut adalah (1) Pemulihan Ekonomi Setempat yang Menyeluruh, (2) Dukungan bagi Sejumlah Kecil Inisiatif Perdamaian Lokal, (3) Pemanfaatan Media.

Pemulihan Ekonomi Lokal Yang Terbuka

Untuk menghindari potensi meningkatnya sinisme tentang inisiatif rekonsiliasi “kosong”, upaya-upaya untuk memperkuat kohesi sosial harus memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat. Prioritas utama di kalangan masyarakat kebanyakan adalah rehabilitasi

ekonomi atau perbaikan nyata lainnya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian upaya retorik rekonsiliasi menjadi kurang penting. Persoalan pemulihan ekonomi ini penting karena ada sekitar 1.000 pemuda yang tidak atau kurang bekerja di Kota Poso dan sekitarnya. Penyebarannya cenderung terpusat di sekitar wilayah semi-urban seperti Tentena, Beteleme, dan Pendolo-Pandajaya. Meskipun belum tentu benar bahwa wilayah ini menjadi tempat perekrutan bagi pelaku kekerasan jika konflik terjadi lagi, tetapi persepsi umum mengandaikan bahwa ada hubungan erat antara pengangguran dan kekerasan. Program lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan dukungan pada para perempuan yang bekerja sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, rekomendasi konkrit yang bisa diberikan adalah meluncurkan pelatihan kejuruan jangka pendek, intensif, dan ditujukan bagi kelompok campuran: kaum muda laki-laki dan perempuan dari berbagai suku dan agama, serta terutama sekali bagi keluarga muda atau yang secara ekonomi lebih rentan. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menentukan ketrampilan mana yang harus diprioritaskan dengan mempertimbangkan permintaan pasar tenaga kerja dan/ atau potensi yang ada. Selain itu penciptaan unit-unit usaha kecil untuk mempermudah kesempatan lapangan kerja. Beberapa sektor bisa menjadi target, seperti kerajinan mengukir kayu³⁰ dan bordir (terbuka bagi laki-laki maupun perempuan), karena dulunya sebelum konflik kedua kerajinan ini merupakan industri rumah tangga yang penting. Kerajinan tersebut juga memiliki potensi untuk berkembang dengan adanya dukungan yang memadai dalam pemasaran dan atau jaringan pembeli dari luar daerah. Suatu tujuan yang eksplisit – meskipun

³⁰ Berhubung banyaknya perhatian terhadap penebangan hutan di Sulawesi Tengah dan kerusakan lingkungan secara umum di Indonesia, keikutsertaan kerajinan ukir dalam program pelatihan dan dukungan untuk usaha kecil ini perlu disertai dengan upaya-upaya konservasi hutan lindung dan pemanfaatan berkelanjutan atas sumber daya hutan lainnya. Ini bukanlah tujuan yang tidak sesuai, tetapi membutuhkan perencanaan yang hati-hati dan mungkin pemakaian jenis kayu lain selain kayu hitam dan kayu keras bernilai tinggi lainnya.

menantang – adalah mendorong pendirian atau perluasan usaha-usaha yang anggotanya terdiri dari campuran berdasar suku dan agama.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun (kembali) Balai Latihan Kerja atau BLK, yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja, di tempat-tempat strategis. Institusi ini dapat berfungsi sebagai magnet lokal untuk integrasi, seperti di Pendolo-Pandajaya (yang juga melayani Pamona Timur dan/atau wilayah barat Kabupaten Morowali). Rehabilitasi BLK kota Poso dapat berperan sebagai daerah penampungan bagi wilayah-wilayah Tentena, kota Poso, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Lage, Tojo, dan Poso Pesisir. Inisiatif semacam ini berpotensi menjangkau ratusan pemuda dan menyokong puluhan usaha kecil selama jangka waktu 2-3 tahun. Perjanjian melalui lembaga seperti BLK juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan para elit lokal untuk membicarakan proyek bersama yang akan memberikan keuntungan konkrit kepada masyarakat mereka. Jelas diperlukan analisis lebih lanjut dan konsultasi dengan para pemuka masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak lain yang relevan untuk mengkaji kesesuaian dan kelayakan inisiatif semacam ini. Pendampingan teknis dapat diberikan kepada Departemen Tenaga kerja untuk membantu memastikan bahwa BLK yang dibangun kembali itu tidak mengikuti pendekatan “cara lama” terhadap pelatihan, kewirausahaan, dan kerjasama antar kelompok.

Dukungan terhadap Inisiatif Perdamaian Lokal, cara-cara Konkrit

Ada banyak upaya-upaya inisiatif masyarakat untuk mengintegrasikan (kembali) antar lembaga atau lingkungan dan untuk mendorong peningkatan kerjasama antar golongan. Analisis lokal lebih lanjut dibutuhkan untuk memahami kelayakan dan persyaratan yang lebih persis bagi setiap kasus. Selanjutnya para agen punya potensi untuk mendukung perencanaan, pelatihan, dan/atau membantu mengatasi kendala-kendala material konkrit dalam upaya pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa contoh inisiatif lokal yang dapat dipertimbangkan untuk diberi dukungan:

- *Sekolah dan Pendidikan Terpadu* – Diperlukan analisis lebih lanjut untuk lebih memahami masing-masing kasus, tetapi beberapa sekolah dapat dibantu dalam

melakukan integrasi kembali, atau mendirikan lembaga (sekolah) baru yang terpadu. Usulan ini meliputi pembangunan SMP antara desa-desa Kristen Sepe, Silanca, dan Bategencu dan wilayah Muslim di sekitar Toyado. UNDP mempunyai pengalaman dalam mensponsori Sekolah Rekonsiliasi yang dijalankan oleh Muhammadiyah di Ambon dan World Vision, dan juga telah mendapatkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam menyokong sekolah terpadu di Maluku Utara melalui “panitia pendidikan masyarakat” yang anggotanya lintas golongan. Selain itu, masyarakat di Maluku juga telah melihat contoh sukses adanya pusat-pusat pelatihan komputer dan kreativitas yang menyediakan kegiatan-kegiatan luar sekolah secara terpadu untuk para remaja.

- *Penyatuan Kembali UNSIMAR* – Rektor Universitas sedang menggerakkan suatu proses bertahap untuk menyatukan kembali kedua kampusnya – kampus utama di kota Poso dan kampus “satelit” non formal yang dibangun untuk para dosen dan mahasiswa Kristen di Tentena. Penyatuan kampus rencananya akan dimulai bulan September 2004 dan mungkin akan membutuhkan materi atau unsur-unsur yang lebih abstrak seperti reformasi kurikulum untuk memperlancar proses ini. Perlu dipertimbangkan juga untuk memberikan dana kepada upaya-upaya yang tengah diajukan oleh organisasi kemahasiswaan Kristen dan Islam (GMKI, HMI, dan KMII) untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang penyelesaian konflik dan kegiatan gabungan lainnya.

- *Kegiatan Rekreasi dan Kesenian Gabungan* – Dukungan dapat diberikan kepada inisiatif lokal untuk memanfaatkan olahraga, rekreasi dan kegiatan pengembangan tim di alam bebas, serta kesenian, terutama menyanyi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi di antara anak-anak, remaja, dan pelatih dewasa. Secara khusus dapat ditargetkan “daerah-daerah kantong” yang suku dan agamanya homogen, seperti Tentena, Kota Poso, dan desa-desa tertentu (misalnya komunitas transmigran dari satu suku atau desa-desa Kristen Mori dan Pamona di sekitarnya yang kurang mengalami hubungan sehari-hari dengan umat Islam di pusat-pusat perkotaan yang lebih besar).

- *Perempuan dan Kohesi Sosial* – Dukungan khusus perlu diberikan pada kegiatan-kegiatan perempuan, seperti Foker Perempuan Poso dan juga Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang lebih kurang telah terbentuk (meski seringkali tidak aktif). Meskipun PKK secara tradisional berfokus pada masalah pengembangan anak-anak, sejumlah responden mengindikasikan bahwa PKK bersedia dan akan menyesuaikan diri untuk terlibat dalam upaya-upaya rekonsiliasi.

- *Program Antar umat Beragama* – Dukungan dapat diberikan untuk membangun kerjasama antara Sinode GKST dan kepemimpinan Muslim melalui jaringan Al-Khairat dan, jika mungkin, MUI. Apabila sesuai, kerjasama demikian dapat diarahkan pada penerbitan berseri (bulletin) dengan tema-tema hak asasi manusia dan keadilan. Buletin yang dibuat oleh tim editorial gabungan ini kemudian bisa disebar sebagai buletin Jumat-an dan buletin Minggu-an, kepada kelompok-kelompok diskusi pemuda, dan bahkan kelompok-kelompok diskusi gabungan antar mahasiswa teologi. Dukungan dari para pemimpin lembaga agama ini juga diharapkan bisa lebih mendorong kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat atau dari desa-ke-desa yang melibatkan kelompok pemuda dan/atau perempuan dari masjid dan gereja, termasuk kegiatan rekreasi dan kesenian (lihat di atas). Memperluas kerjasama ini dengan melibatkan kelompok umat Hindu (dan juga Katolik) akan lebih memperkuat pesan dan dampak non-aliran dalam inisiatif tersebut. Meskipun bidang ini sebaiknya ditangani dengan hati-hati, langkah pertama yang mungkin dilakukan adalah mengkaji ulang hasil-hasil pertemuan bulan November 2003 tentang dialog internal dan antar golongan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Poso.

- *Forum-forum Rekonsiliasi Lainnya* – Terlalu dini untuk merekomendasikan dukungan yang signifikan terhadap upaya-upaya lain yang lebih eksplisit dalam rekonsiliasi antar kelompok, seperti Ikatan Kekeluargaan Siwagi Lemba Poso, Forum Komunikasi Pemuda Pamona Selatan, dan KNPI (yang telah mendapatkan sokongan pemerintah). Akan tetapi, untuk beberapa bulan ke depan, adalah mungkin untuk melakukan identifikasi dan mempertimbangkan untuk memberikan

bantuan yang lebih konkrit berdasarkan kebutuhan yang ada dan potensi kapasitas penerapan yang efektif.

Menggunakan Media untuk Mendukung Upaya-upaya Perdamaian Lainnya

Sebagai pelengkap strategi dan inisiatif yang telah disebutkan di atas, media dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya-upaya perdamaian. Media meliputi radio (ada sejumlah stasiun radio FM dengan jangkauan geografis yang sangat terbatas akan tetapi dapat diperluas) atau media dengan penyebaran terbatas seperti lembar berita dan pemutaran VCD dengan kelompok diskusi untuk peminat yang lebih spesifik. Upaya berbasis media seperti ini akan menjadi strategi penting untuk mengatasi satu dari sejumlah kendala utama dalam kohesi sosial: keterpisahan komunitas karena jarak fisik dan/atau efek homogenisasi dari pengungsian.³¹ Beberapa contoh telah disebutkan, bukan berarti untuk menyokong gagasan-gagasan tertentu, tetapi untuk menunjukkan potensi advokasi masyarakat dan perluasan penyebaran atau diskusi tentang tema-tema yang relevan:

- Peningkatan interaksi di kalangan anak muda melalui olahraga atau kegiatan kesenian dapat dilengkapi dengan “dialog interaktif” di stasiun radio lokal sebagai kesempatan bagi para remaja dari semua kelompok untuk membicarakan dan mempublikasikan permasalahan, ketakutan, dan harapan mereka. Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk kelompok usia, kelompok demografis, atau kelompok pekerjaan khusus lainnya, seperti tokoh perempuan setempat atau pedagang pasar. Penyusunan program dan kelompok diskusi serupa juga dapat dibina dengan memanfaatkan sandiwara radio oleh *Common Ground Indonesia* tentang kehidupan sosial dalam kemajuan budaya bertajuk “Menteng Pangkalan”.

- Interaksi antara berbagai kelompok di tingkat masyarakat atau antar desa dapat diperkuat dengan pemutaran VCD yang sesuai secara berkala, diikuti dengandiskusi. Pada semua desa yang dikunjungi oleh tim, ditemui banyak rumah tangga yang telah memiliki TV

³¹ Kajian tematis mengenai media dan penyusunan program berikutnya juga merujuk pada beberapa isu yang lebih luas yang beredar di media.

dan VCD *player*. Sebagai alternatif, sebuah proyektor media dapat diputar secara bergilir dari satu tempat ke tempat lainnya. LSM lokal atau inisiatif rekonsiliasi masyarakat setempat (misalnya Forum Komunikasi Pemuda Pamona Selatan) dapat dilibatkan untuk melaksanakan hal ini pada wilayah geografis tertentu.

- Sebagai bagian dari kerjasama gereja-mesjid yang lebih luas, serangkaian lembar berita atau buletin (paralel) tentang tema-tema seputar perdamaian dan hak asasi manusia dapat dikembangkan untuk dipergunakan sebagai bahan perenungan untuk kelompok-kelompok diskusi rutin yang ada. Bisa diambil contoh pengalaman tabloid Bintang Laut umat Katolik di Kabupaten Banggai serta penerbitan-penerbitan serupa di Maluku Utara dan tempat-tempat lain di Indonesia.

Batasan-batasan

Inti dari ketiga rangkaian rekomendasi di atas sebenarnya adalah untuk menangani 2-3 faktor utama yang memecah belah masyarakat Poso secara internal maupun antar kelompok satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang dimaksud adalah pemisahan fisik dan keberadaan jaringan agama atau suku-budaya yang paralel, yang dapat dijumpai dengan hati-hati. Akan tetapi, ada dua bidang – ketidakamanan dan perasaan tidak puas serta ketidakadilan – di mana peran pelaku luar menjadi sangat terbatas karena untuk menanganinya diperlukan peran pemerintah/negara. Namun, dukungan bisa diberikan dalam hal advokasi di tingkat masyarakat, terutama melalui upaya-upaya seperti kampanye anti korupsi yang mencakup atau mempengaruhi lebih dari satu kelompok suku dan agama.

5.3 Bidang-bidang Interaksi dan Sinergi dengan Upaya Lain

Ada bidang-bidang yang nyata untuk mengembangkan sinergi dengan komponen penyusunan program pasca konflik lainnya, yaitu pemulihan ekonomi, pemerintahan yang baik, dan dukungan media, dan juga isu gender. Upaya mengidentifikasi dan mendukung tokoh perempuan setempat, terutama perempuan Muslim, sebagai bagian dari program kohesi

sosial menjadi sangat penting. Selain itu, mutlak diperlukan untuk membangun koordinasi antar lembaga yang efektif untuk mendukung kohesi sosial dengan Program Pembangunan kecamatan dan Bantuan untuk Program Pemulihan Ekonomi oleh Bank Dunia, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pedesaan oleh ADB, dan Program Pencegahan dan Tanggapan Konflik dari Kantor USAID.

5.4 Kerangka Kerja untuk Monitoring dan Evaluasi

Membangun kerangka kerja yang efektif untuk monitoring dan evaluasi hendaknya menjadi prioritas dalam pengembangan program. Tantangan pertamanya adalah menjabarkan “teori perubahan” yang mendasari setiap program. Diasumsikan bahwa ada keterkaitan antara mencapai tujuan program dan memberikan kontribusi pada “perdamaian” dalam konteks yang lebih luas. Perlu dipertimbangkan lagi mengenai asumsi adanya keterkaitan antara kohesi sosial di tingkat masyarakat dan pencegahan tindak kekerasan lebih lanjut di daerah Poso, atau batasan-batasan dari hubungan ini. Mungkin komponen program lain seperti pemerintahan, bisa menawarkan kesempatan yang lebih kokoh untuk memperkuat perdamaian secara langsung melalui dukungan atas reformasi atau pembentukan lembaga-lembaga yang dapat menangani rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Dengan demikian proyek kohesi sosial akan tampak mendukung perdamaian atau membantu masyarakat mengatasi efek negatif dari konflik, seperti perpecahan dan kurangnya kepercayaan antar kelompok.

Pelaku-pelaku eksternal juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengantisipasi dan mengawasi potensi munculnya dampak negatif dari penyusunan program mereka sendiri. Termasuk di dalamnya resiko yang tidak perlu dalam program untuk mempertemukan beberapa individu atau kelompok. Dan juga memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil dan merata di seluruh wilayah dan pada semua suku dan agama yang ada. Perubahan sosial, baik itu didukung oleh program pembangunan maupun tidak, seringkali menghasilkan “pemenang” dan “pecundang” seiring dengan bergesernya akses atau kendali atas aset-aset produktif atau

kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan dari waktu ke waktu. Di wilayah Poso yang relatif 'bertegangan tinggi', para pemenang atau pecundang yang mewakili suku dan agama tertentu dapat menjadi kendala dalam mempertahankan perdamaian apabila transformasi sosial dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, upaya-upaya "kohesi sosial" berskala kecil akan cepat diruntuhkan oleh proses yang lebih besar yang memicu kecemburuan antar kelompok atau gagal dalam menanggapi ketidakadilan sosial.

5.5 Ringkasan

Kohesi sosial merupakan hasil dari berbagai aspek kehidupan dan bukan sekedar suatu proyek ataupun sub-proyek. Dukungan terhadap kohesi sosial harus datang dari cara penduduk setempat dan pemangku-pemangku kepentingan merumuskan kegiatan bersama dan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Penggunaan istilah-istilah seperti kohesi sosial, rekonsiliasi, pembangunan perdamaian, dan terminologi lainnya dalam program-program perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan bahkan mungkin dihindari. Diperlukan strategi yang lebih alami ketimbang program-program eksternal yang oleh pemangku-pemangku kepentingan dianggap manipulatif. Masyarakat setempat hendaknya dibantu untuk membina minat bersama dan menggali kapasitas serta sumber daya mereka tanpa selalu harus membutuhkan bantuan pendanaan. Kuncinya adalah menemukan pelaku lokal yang bertindak sebagai fasilitator setempat, yang dapat mendorong masyarakat menyumbangkan ide bagi pemecahan masalah dan perubahan positif.